

DINAMIKA ORDE BARU

*Dari Konsolidasi Pembangunan
Menuju Krisis
Hingga Reformasi*

Yadi Kusmayadi, M.Pd. | Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.
Dr. Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd. | Dewi Ratih, M.Pd.
Wulan Sondarika, M.Pd. | Aan Suryana, M.Pd.
Sri Pajriah, M.Pd. | Egi Nurholis, M.Pd. Sudarto, M.Pd.
Ghea Andriany Hervista, M.Pd.
Dkk.



DINAMIKA ORDE BARU

**Dari Konsolidasi Pembangunan Menuju Krisis
Hingga Reformasi**

DINAMIKA ORDE BARU

**Dari Konsolidasi Pembangunan Menuju Krisis
Hingga Reformasi**

**Yadi Kusmayadi, M.Pd. | Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.
Dr. Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd. | Dewi Ratih, M.Pd.
Wulan Sondarika, M.Pd. | Aan Suryana, M.Pd.
Sri Pajriah, M.Pd. | Egi Nurholis, M.Pd. Sudarto, M.Pd.
Ghea Andriany Hervista, M.Pd.
Dkk.**



DINAMIKA ORDE BARU

Dari Konsolidasi Pembangunan Menuju Krisis Hingga Reformasi

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:

**Yadi Kusmayadi, M.Pd. | Dr. H. Yat Rospia Brata, M.Si.
Dr. Yeni Wijayanti, M.Hum., M.Pd. | Dewi Ratih, M.Pd. | Wulan Sondarika, M.Pd.
Aan Suryana, M.Pd. | Sri Pajriah, M.Pd. | Egi Nurholis, M.Pd. | Sudarto, M.Pd.
Ghea Andriany Hervista, M.Pd. |Dkk.**

Editor: Yudi Umara

Cetakan Pertama: Februari 2026

Cover: Tim Penyusun

Tata Letak: Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2026, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website: www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail: rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2026 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I -: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2026
Dimensi : 14,8 x 21 cm

ISBN 978-634-239-313-0

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya buku *“Dinamika Orde Baru: Dari Konsolidasi Pembangunan, Menuju Krisis hingga Reformasi”* dapat disusun dan dihadirkan kepada para pembaca. Buku ini lahir dari kebutuhan untuk memahami salah satu fase paling menentukan dalam perjalanan sejarah Indonesia modern—sebuah periode yang membentuk wajah politik, ekonomi, dan sosial bangsa hingga hari ini.

Orde Baru sering dipahami secara hitam-putih: di satu sisi dikenal sebagai era stabilitas dan pembangunan, namun di sisi lain diingat sebagai masa pembatasan kebebasan dan sentralisasi kekuasaan. Buku ini berupaya melampaui penilaian yang sederhana tersebut dengan menyajikan dinamika Orde Baru secara lebih utuh, kritis, dan kontekstual—mulai dari proses konsolidasi kekuasaan pasca-1965, keberhasilan dan paradoks pembangunan nasional, hingga akumulasi krisis yang berujung pada lahirnya era Reformasi.

Melalui pendekatan historis yang naratif dan analitis, pembaca diajak menelusuri bagaimana kebijakan negara, relasi kekuasaan, peran militer, pertumbuhan ekonomi, serta suara-suara masyarakat saling berkelindan membentuk dinamika zaman. Dengan bahasa yang diupayakan tetap lugas dan mudah dipahami, buku ini ditujukan tidak hanya bagi kalangan akademisi dan pelajar, tetapi juga bagi masyarakat umum yang ingin memahami akar persoalan bangsa secara lebih mendalam.



Penulis menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan masukan yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan di masa mendatang. Semoga buku ini dapat menjadi bahan bacaan yang bermanfaat, memperkaya wawasan sejarah, serta mendorong pembaca untuk bersikap kritis dan reflektif dalam memaknai masa lalu sebagai pijakan menata masa depan Indonesia.

Akhir kata, semoga kehadiran buku ini dapat memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan, kajian sejarah, dan penguatan kesadaran kebangsaan.

Penerbit
**Perkumpulan
Rumah Cemerlang Indonesia**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 ANATOMI PERGOLAKAN POLITIK INDONESIA: DARI PEMBERONTAKAN MADIUN HINGGA KONSOLIDASI ORDE BARU(1948-1968).....	1
A. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa G 30 S 1965	1
B. Kronologi Peristiwa G 30 S 1965	8
C. Epilog Peristiwa G 30 S 1965 dan Dampaknya	10
D. Rangkuman	19
BAB 2 PEMBANGUNAN DAN STABILITAS: TINJAUAN MULTIDIMENSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN STRATEGIS ERA ORDE BARU	21
A. Kebijakan Orde Baru Pada Politik Dalam Negeri	25
B. Kebijakan Orde Baru Pada Politik Luar Negeri.....	28
C. Kondisi Perekonomian Pada Masa Orde Baru.....	32
D. Kondisi Keamanan pada Masa Orde Baru.....	36
E. Dampak Kebijakan Orde Baru.....	39
F. Rangkuman	42
BAB 3 PERISTIWA (MALARI) MALAPETAKA 15 JANURI 1974.....	44
A. Kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia Menjelang Peristiwa Malari.....	44
B. Latar Belakang Munculnya Gerakan Mahasiswa.....	45



C. Kunjungan Perdana Menteri Jepang dan Pemicunya	46
D. Kronologi Peristiwa Malari 15 Januari 1974.....	47
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan Massal	49
F. Dampak Peristiwa Malari terhadap Pemerintahan Orde Baru.....	50
G. Pengaruh Malari terhadap Gerakan Mahasiswa dan Media Massa.....	52
H. Rangkuman	53
BAB 4 ARSITEKTUR PEMBANGUNAN ORDE BARU: ANALISIS STRATEGIS REPELITA I-VI DALAM TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA	
A. Konsep Dasar REPELITA Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional.....	60
B. Pola Kontinuitas dan Perubahan Strategi Pembangunan.....	64
C. Landasan Filosofis Pembangunan: Trilogi Pembangunan.....	65
D. REPELITA I (1969-1974): Fondasi Stabilitas dan Pertanian.....	67
E. REPELITA II (1974-1979): Konsolidasi dan Pemerataan Wilayah	70
F. REPELITA III (1979-1984): Pertumbuhan, Pemerataan, dan Ekspor	72
G. REPELITA IV (1984-1989): Industrialisasi Mandiri dan Pengembangan SDM	75

H. REPELITA V (1989-1994): Konsolidasi dan Daya Saing Nasional.....	78
I. REPELITA VI (1994-1999): Lepas Landas yang Terhenti.....	81
J. Rangkuman	83
BAB 5 KRISIS DAN PERUBAHAN: ANALISIS MULTIDIMENSIONAL TERHADAP RUNTUHNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA ERA REFORMASI.....	
A. Akar dan Penyebab Terjadinya Reformasi 1998.....	89
B. Dinamika Gerakan Reformasi.....	93
C. Rangkuman	116
DAFTAR PUSTAKA.....	118





SELAMAT MEMBACA

SALAM LITERASI

BAB 1

ANATOMI PERGOLAKAN POLITIK INDONESIA: DARI PEMBERONTAKAN MADIUN HINGGA KONSOLIDASI ORDE BARU(1948-1968)

*Cecep Husnan Abdul Jabar, Cipto Surya Pramesti,
Zalma Dapik Putra Pamungkas, dan Dudung Abdul Manaf*

A. Latar Belakang Terjadinya Peristiwa G 30 S 1965

1. Peristiwa PKI Madiun 1948

Peristiwa PKI Madiun 1948 merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah awal Republik Indonesia yang berkaitan erat dengan konflik ideologi dan konsolidasi kekuasaan negara pasca kemerdekaan. Peristiwa ini terjadi pada 18 September 1948 di Madiun, Jawa Timur, ketika Partai Komunis Indonesia (PKI) memproklamasikan pembentukan “Pemerintahan Front Nasional” yang menentang pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta. Peristiwa ini terjadi dalam situasi politik dan militer yang tidak stabil, terutama setelah penandatanganan Perjanjian Renville pada Januari 1948 yang dianggap merugikan Indonesia dan memicu ketegangan di berbagai daerah.

Latar belakang terjadinya Peristiwa Madiun tidak dapat dilepaskan dari pertentangan ideologi antara kelompok nasionalis, Islam, dan komunis di tubuh Republik Indonesia. Kembalinya Musso dari Uni Soviet pada Agustus 1948 membawa perubahan signifikan dalam strategi PKI. Musso



memperkenalkan “Jalan Baru untuk Republik Indonesia” yang bertujuan menjadikan PKI sebagai kekuatan revolusioner utama dengan orientasi komunisme internasional. Strategi ini mendorong PKI untuk mengambil langkah-langkah radikal guna merebut kekuasaan politik. Menurut M.C. Ricklefs, kembalinya Musso menandai pergeseran tajam PKI menuju garis revolusioner yang lebih keras dan konfrontatif (Ricklefs, 2012).

Ketegangan politik semakin meningkat ketika terjadi konflik antara kelompok kiri yang tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR) dengan pemerintah Republik Indonesia. FDR yang didominasi unsur PKI menentang kebijakan rasionalisasi dan reorganisasi Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang diprakarsai oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta. Kebijakan ini dianggap melemahkan kekuatan militer rakyat yang banyak berafiliasi dengan kelompok kiri. Situasi tersebut diperparah oleh aksi-aksi sepihak yang dilakukan oleh kelompok PKI dan organisasi massanya, seperti pengambilalihan tanah dan pabrik, yang menimbulkan keresahan sosial di masyarakat.

Pada 18 September 1948, PKI dan FDR mengumumkan pengambilalihan kekuasaan di Madiun dan mendirikan pemerintahan tandingan. Tindakan ini dipandang oleh pemerintah sebagai pemberontakan terhadap negara. Presiden Soekarno dalam pidato radionya secara tegas meminta rakyat memilih antara “Soekarno-Hatta atau Musso.” Pemerintah kemudian mengerahkan TNI untuk menumpas gerakan tersebut. Dalam waktu singkat, pasukan TNI berhasil menguasai kembali Madiun dan daerah sekitarnya. Musso tewas dalam pengejaran pada akhir Oktober 1948, sementara tokoh-tokoh PKI lainnya ditangkap dan dihukum.



Penumpasan PKI Madiun memiliki dampak politik yang sangat besar. Pemerintah Republik Indonesia berhasil menegaskan otoritasnya sebagai satu-satunya kekuasaan yang sah, sekaligus memperkuat posisi TNI sebagai alat pertahanan negara. Peristiwa ini juga menimbulkan trauma politik yang mendalam terhadap gerakan komunisme di Indonesia. Banyak kader dan simpatisan PKI ditangkap, dipenjara, atau dieksekusi, sehingga PKI mengalami kehancuran organisasi yang hampir total. Namun demikian, seperti dicatat oleh Ruth McVey, PKI tidak sepenuhnya hilang dan justru belajar dari kegagalannya untuk kemudian bangkit kembali pada awal 1950-an dengan strategi yang lebih moderat (McVey, 2009).

Dalam perspektif historiografi modern, Peristiwa PKI Madiun 1948 tidak hanya dipahami sebagai pemberontakan semata, tetapi juga sebagai konflik politik yang kompleks akibat tekanan internasional, instabilitas domestik, dan perebutan arah ideologi negara. John Roosa menekankan bahwa peristiwa ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan sikap anti-komunisme negara Indonesia di masa-masa berikutnya (Roosa, 2015). Dengan demikian, PKI Madiun merupakan peristiwa kunci yang membentuk perjalanan politik Indonesia dan hubungan antara negara, militer, serta ideologi komunis pada era awal kemerdekaan.

2. Peran PKI dalam Pemerintahan Soekarno

Pada masa pascakemerdekaan Indonesia, Partai Komunis Indonesia (PKI) mengalami dinamika politik yang signifikan, terutama pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Setelah mengalami kehancuran akibat Peristiwa Madiun 1948, PKI berhasil bangkit kembali pada awal 1950-an di bawah kepemimpinan D.N. Aidit, M.H. Lukman, Njoto, dan Sudisman.



Berbeda dengan strategi revolusioner bersenjata sebelumnya, PKI mengubah orientasi perjuangannya melalui jalur politik parlementer dan penguatan organisasi massa. Strategi ini terbukti efektif, terbukti dengan keberhasilan PKI menjadi salah satu partai terbesar dalam Pemilu 1955. Herbert Feith menyatakan bahwa PKI merupakan partai dengan tingkat disiplin dan organisasi yang paling solid di Indonesia pada masa itu (Feith, 2007).

Memasuki akhir 1950-an, sistem Demokrasi Liberal dianggap Soekarno gagal menciptakan stabilitas politik. Melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan. Dalam sistem ini, posisi PKI justru semakin menguat. PKI mendukung penuh kebijakan Soekarno, terutama konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme), yang bertujuan menyatukan kekuatan ideologis bangsa. M.C. Ricklefs menyatakan bahwa Soekarno secara sadar memberikan ruang politik luas kepada PKI sebagai penyeimbang kekuatan militer dan kelompok Islam konservatif (Ricklefs, 2012).

Dalam bidang ideologi dan kebijakan negara, PKI berperan aktif mendukung arah politik revolusioner Soekarno. PKI menjadi pendukung utama Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol USDEK) yang dijadikan sebagai garis besar haluan negara. Partai ini juga konsisten mengusung sikap anti-imperialisme, anti-neokolonialisme, serta menolak dominasi modal asing. D.N. Aidit menegaskan bahwa Manipol merupakan pedoman utama revolusi Indonesia (Aidit, 2014). Kekuatan utama PKI terletak pada jaringan organisasi massanya yang sangat luas, seperti SOBSI, Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat, Gerwani, dan Lekra. Melalui



organisasi-organisasi ini, PKI berhasil menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Ruth McVey menyebut keberhasilan PKI dalam membangun basis massa sebagai faktor utama meningkatnya pengaruh politik partai tersebut (McVey, 2009).

Hubungan antara PKI dan Presiden Soekarno bersifat simbiotik. Namun, kedekatan ini menimbulkan ketegangan dengan Angkatan Darat yang memandang PKI sebagai ancaman ideologis dan politik. Ketegangan tersebut mencapai puncaknya setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965. John Roosa menegaskan bahwa kehancuran PKI merupakan titik balik penting dalam sejarah politik Indonesia modern (Roosa, 2006).

3. Pengkhianatan konstitusi PKI menyusup ke tubuh ABRI

Dalam sejarah politik Indonesia modern, Partai Komunis Indonesia (PKI) sering dituduh melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi negara melalui berbagai upaya politik yang dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan ideologi Pancasila. Salah satu tuduhan yang paling menonjol adalah adanya upaya penyusupan PKI ke dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Tuduhan ini berkembang kuat terutama setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S), yang dalam narasi resmi negara dipahami sebagai bukti puncak konspirasi PKI untuk merebut kekuasaan negara secara inkonstitusional. Karena ABRI merupakan pilar utama pertahanan negara dan penjaga kedaulatan nasional, setiap upaya melemahkan institusi ini dipandang sebagai ancaman serius terhadap tatanan konstitusional Indonesia.



Isu penyusupan PKI ke dalam ABRI tidak dapat dilepaskan dari konteks politik masa Demokrasi Terpimpin (1959–1965). Pada periode ini, Presiden Soekarno memusatkan kekuasaan politik dan mendorong persatuan ideologis melalui konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunisme). Konsep ini dimaksudkan untuk menyatukan berbagai kekuatan politik bangsa demi menopang revolusi Indonesia. Namun, dalam praktiknya, konsep Nasakom justru membuka ruang politik yang luas bagi PKI untuk memperluas pengaruhnya di berbagai sektor negara. Kedekatan politik PKI dengan Presiden Soekarno menimbulkan kecurigaan mendalam di kalangan perwira Angkatan Darat, yang sejak awal memandang komunisme sebagai ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan tradisi ketatanegaraan Indonesia. Ricklefs menegaskan bahwa hubungan antara PKI dan Angkatan Darat pada masa ini ditandai oleh ketegangan ideologis dan persaingan politik yang tajam (Ricklefs, 2012).

Dalam narasi resmi negara pasca-1965, PKI dituduh membentuk jaringan rahasia yang dikenal sebagai Biro Khusus PKI. Biro ini disebut bertugas menjalin hubungan dengan oknum-oknum perwira ABRI guna memengaruhi orientasi politik dan loyalitas mereka. Keberadaan Biro Khusus sering dijadikan bukti bahwa PKI melakukan infiltrasi sistematis ke dalam struktur militer. Tuduhan tersebut semakin menguat setelah terjadinya peristiwa G30S, ketika enam jenderal Angkatan Darat dan beberapa perwira lainnya diculik dan dibunuh. Negara kemudian menyimpulkan bahwa peristiwa ini merupakan puncak dari pengkhianatan PKI terhadap konstitusi, karena dilakukan melalui kekerasan, di luar mekanisme hukum, dan bertujuan mengganti kepemimpinan nasional secara paksa.



Dari perspektif konstitusional, tindakan yang dituduhkan kepada PKI dianggap melanggar prinsip-prinsip dasar negara, terutama kedaulatan rakyat, supremasi hukum, dan ideologi Pancasila. Upaya perebutan kekuasaan melalui konspirasi dan kekerasan dipandang bertentangan dengan sistem pemerintahan yang berdasarkan UUD 1945. Oleh karena itu, setelah peristiwa G30S, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan Ketetapan No. XXV/MPRS/1966 yang secara resmi membubarkan PKI dan melarang penyebaran ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme di Indonesia. Ketetapan ini menjadi dasar hukum bagi pembersihan institusi negara, termasuk ABRI, dari unsur-unsur yang dianggap terlibat atau bersimpati terhadap PKI.

Pada masa Orde Baru, isu penyusupan PKI ke dalam ABRI dikonstruksikan sebagai pembenaran historis atas kebijakan politik dan keamanan negara. ABRI ditempatkan sebagai kekuatan utama penjaga Pancasila dan UUD 1945 melalui doktrin Dwifungsi ABRI. Dalam kerangka ini, penghapusan pengaruh PKI dari tubuh militer dipandang sebagai langkah konstitusional untuk menyelamatkan negara dari ancaman ideologi yang dianggap totaliter dan anti-Pancasila. Narasi ini kemudian diajarkan secara sistematis melalui pendidikan, media, dan doktrin negara selama puluhan tahun.

Namun, kajian sejarah kontemporer memberikan perspektif yang lebih kritis terhadap narasi penyusupan PKI ke dalam ABRI. Sejarawan seperti John Roosa dan Harold Crouch menilai bahwa meskipun terdapat hubungan politik antara PKI dan individu-individu tertentu di lingkungan militer, bukti mengenai infiltrasi terstruktur dan terpusat secara institusional masih menjadi perdebatan. Roosa menekankan bahwa konflik internal elite politik, rivalitas antara Presiden



Soekarno dan Angkatan Darat, serta tekanan geopolitik Perang Dingin turut membentuk narasi pengkhianatan konstitusi yang berkembang setelah 1965 (Roosa, 2006). Dengan demikian, isu penyusupan PKI ke dalam ABRI tidak dapat dilepaskan dari konteks perebutan kekuasaan nasional dan internasional yang kompleks.

Dengan demikian, tuduhan pengkhianatan konstitusi oleh PKI melalui penyusupan ke tubuh ABRI merupakan bagian dari sejarah konflik ideologis Indonesia yang multidimensional. Dalam perspektif resmi negara, PKI dipandang sebagai ancaman serius terhadap Pancasila dan UUD 1945. Sementara itu, dalam kajian akademik modern, peristiwa ini dipahami sebagai hasil dari dinamika politik, ideologi, dan militer yang saling berkaitan. Pemahaman sejarah yang komprehensif, kritis, dan berbasis sumber ilmiah menjadi penting agar peristiwa ini tidak hanya dipahami sebagai narasi tunggal, tetapi sebagai proses historis yang kompleks dan sarat kepentingan politik.

B. Kronologi Peristiwa G 30 S 1965

Dalam upaya penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh tentara Cakrabirawa terhadap para perwira tinggi yang digadag gadang merupakan “Dewan Jenderal” sebagai Tujuan perencanaan kudeta terhadap Presiden Soekarno menjadikan target utama pada gerakan yang dikenal sebagai G30S dengan tujuan untuk menggagalkan kudeta yang seharusnya direncanakan oleh Dewan Jenderal (Zanynu, 2018). Kronologi Gerakan ini bermula dari rancangan persiapan dan koordinasi.



Pada bulan-bulan menjelang September 1965, PKI (Partai Komunis Indonesia) mengadakan serangkaian pertemuan rahasia untuk merencanakan gerakan yang kemudian dikenal sebagai G30S. Pertemuan ini melibatkan tokoh-tokoh penting PKI seperti D.N. Aidit dan intelijen Biro Khusus PKI. Biro Khusus ini bertugas mempersiapkan informasi detail pelaksanaan gerakan, termasuk merekrut pasukan dan menentukan target operasi. Pada akhir Agustus 1965, keputusan terkait pelaksanaan gerakan pun akhirnya diterima. Gerakan dimulai pada malam tanggal 30 September 1965, hingga dini hari 1 Oktober 1965. Pasukan yang terdiri dari anggota PKI dan organisasi-organisasi kecil pendukung PKI bergerak menuju rumah-rumah target yang telah ditentukan (Zanynu, 2018). Termasuk kediaman pribadi Letnan Jenderal Ahmad Yani sekitar pukul 04.00 WIB, Pasukan G30S mendatangi rumah Jenderal Ahmad Yani dengan maksud untuk menangkapnya. Ahmad Yani menolak untuk dibawa dan melawan saat akan ditangkap. Akibatnya, ia ditembak mati di tempat oleh anggota pasukan penculik di rumahnya sendiri. Kemudian mendatangi rumah Mayjen R. Soeprapto dan membawanya dengan paksa tanpa ada perlawanan, berbeda dengan kronologi pengepungan rumah Mayjen M.T. Haryono. Diman ia sempat melawan saat akan ditangkap, namun kalah jumlah. M.T. Haryono ditembak mati. Selain itu disusul oleh Mayjen S. Parman yang ditangkap hidup-hidup di rumahnya oleh pasukan G30S. Ia tidak melakukan perlawanan dan dibawa ke Lubang Buaya. Kronologi diteruskan menuju Brigjen D.I. Pandjaitan, Brigjen Sutoyo Siswomiharjo dan Lettu Pierre Tendean. Dengan itu, Beberapa di antara mereka dibunuh di rumah mereka, sementara yang lain dibawa ke Lubang Buaya, sebuah daerah di pinggiran Jakarta, di mana mereka disiksa dan dibunuh (Anam *et al.*, 2024)



Dalam upaya mencoba mendoktrin pandangan masyarakat tentang G 30 S yang dimanipulasi sebagai bentuk penyelamatan negara dari "Dewan Jenderal" yang ingin mengambil alih kekuasaan. Pengumuman ini bertujuan untuk memberikan kesan bahwa gerakan tersebut adalah upaya penyelamatan negara, bukan kudeta Melalui gedung Radio Republik Indonesia (RRI). Sehingga dari sinilah menjadi sebuah puncak yang sangat lancip sebagai hasil dari ketegangan TNI AD dan PKI serta secara tidak langsung memunculkan pandangan terbuka tentang Tujuan G30S sebagai bentuk Pemberontakan Negara.

C. Epilog Peristiwa G 30 S 1965 dan Dampaknya

1. Supersemar

Puncak ketegangan politik terjadi pada bulan Maret 1966. Pada tanggal 11 Maret, saat sidang kabinet berlangsung di Istana Negara, situasi keamanan di Jakarta dianggap tidak kondusif karena adanya pasukan tak dikenal (yang belakangan diketahui sebagai RPKAD tanpa lencana). Presiden Soekarno kemudian meninggalkan sidang menuju Istana Bogor, yang kemudian disusul oleh tiga jenderal: Basuki Rahmat, M. Jusuf, dan Amir Machmud.

Pertemuan di Bogor tersebut menghasilkan dokumen yang sangat krusial dalam sejarah Indonesia, yakni Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Secara tekstual, surat ini berisi instruksi Presiden Soekarno kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu demi terjaminnya keamanan, ketenangan, dan kestabilan



pemerintahan, serta keselamatan pribadi Presiden (Purnomo, 2020).

Namun, interpretasi terhadap Supersemar menjadi titik perdebatan historiografi yang panjang. Bagi Soekarno, surat tersebut adalah instruksi pengamanan teknis semata. Sebaliknya, bagi Soeharto dan pendukung Orde Baru, Supersemar dimaknai sebagai pelimpahan wewenang eksekutif (transfer of authority) yang melegitimasi tindakan politik strategis. Perbedaan tafsir ini menjadi landasan pergeseran kekuasaan secara de facto. Langkah pertama yang diambil Soeharto menggunakan Supersemar adalah membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966. Tindakan tegas ini mendapat sambutan positif dari masyarakat yang telah lama menuntut pembubaran partai tersebut melalui Tritura. Pembubaran ini secara efektif melumpuhkan basis kekuatan politik yang selama ini menjadi penyeimbang kekuasaan Soekarno dalam konsep Nasakom. Hingga saat ini, aspek otentikasi naskah asli Supersemar masih menjadi diskursus di kalangan sejarawan dan arsiparis. Terdapat beberapa versi naskah yang beredar, namun belum ada satu pun yang dinyatakan sebagai naskah otentik tunggal oleh Arsip Nasional Republik Indonesia. Meskipun demikian, dampak politis dari surat tersebut adalah fakta sejarah yang tidak terbantahkan dalam memuluskan jalan bagi Soeharto menuju kursi kepresidenan.

2. Gerakan Mahasiswa dan Tritura

Merespons situasi tersebut, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI), diikuti oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPI) dan organisasi lainnya, memelopori



demonstrasi besar-besaran. Puncak dari gerakan ini terjadi pada tanggal 10-12 Januari 1966, ketika mahasiswa mendatangi Gedung DPR-GR dengan membawa tiga tuntutan utama yang dikenal sebagai Tri Tuntutan Rakyat (Tritura).

Isi dari Tritura mencerminkan aspirasi mendasar rakyat pada saat itu, yaitu: (1) Pembubaran PKI beserta ormas-ormasnya, (2) Perombakan Kabinet Dwikora, dan (3) Penurunan harga pangan/sandang. Tuntutan pembubaran PKI didasarkan pada keyakinan bahwa partai tersebut adalah dalang di balik kekacauan politik, sementara perombakan kabinet ditujukan untuk membersihkan unsur-unsur yang dianggap terlibat G30S dari pemerintahan (Setiyanto et al., 2022).

Tekanan terhadap Presiden Soekarno semakin menguat ketika beliau merespons dengan melakukan reshuffle kabinet menjadi "Kabinet 100 Menteri". Namun, langkah ini justru memicu kemarahan lebih lanjut karena masih terdapat tokoh-tokoh yang dianggap berafiliasi dengan kaum kiri di dalam kabinet tersebut. Aksi demonstrasi yang terus berlanjut bahkan memakan korban jiwa, salah satunya adalah mahasiswa Universitas Indonesia, Arif Rahman Hakim, yang gugur dan menjadi martir bagi gerakan mahasiswa angkatan '66.

Peran angkatan bersenjata, khususnya Angkatan Darat, dalam periode ini tidak dapat diabaikan. Terdapat aliansi taktis antara mahasiswa dan tentara yang sama-sama memiliki sentimen anti-komunis. Simbiosis ini memperkuat posisi tawar para demonstran di hadapan Presiden Soekarno, menciptakan dualisme kekuatan politik antara Istana Merdeka yang dikuasai Soekarno dan Markas Besar Angkatan Darat yang dipimpin oleh Letjen Soeharto.



3. Ketetapan MPRS

Untuk memperkuat legitimasi tindakannya, Soeharto membawa Supersemar ke ranah konstitusional melalui Sidang Umum IV MPRS pada pertengahan tahun 1966. MPRS, yang keanggotaannya telah dibersihkan dari unsur-unsur kiri, mengeluarkan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966. Ketetapan ini mengukuhkan Supersemar sebagai keputusan MPR, yang berarti Presiden Soekarno tidak dapat mencabut surat perintah tersebut sewaktu-waktu. Sidang Umum MPRS 1966 juga menghasilkan keputusan strategis lainnya, termasuk Ketetapan MPRS No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Menyebarkan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Produk hukum ini menjadi landasan ideologis jangka panjang bagi Orde Baru dalam menyingkirkan ideologi kiri dari ruang publik Indonesia dan membentuk stabilitas politik berbasis keamanan (Sari & Huda, 2019).

Dualisme kepemimpinan nasional semakin meruncing memasuki tahun 1967. Presiden Soekarno menyampaikan pidato pertanggungjawaban yang dikenal sebagai "Nawaksara", namun ditolak oleh MPRS karena dianggap tidak menjelaskan secara rinci keterkaitan G30S dengan kemerosotan moral dan ekonomi bangsa. Penolakan ini menandai hilangnya dukungan politik parlemen terhadap Sang Proklamator. Puncaknya adalah dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 tentang Pencabutan Kekuasaan Pemerintahan Negara dari Presiden Soekarno. Ketetapan ini sekaligus mengangkat Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden. Momen ini secara resmi menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya era Orde Baru secara konstitusional.



Transisi kekuasaan ini menunjukkan bagaimana hukum dan konstitusi digunakan sebagai instrumen legitimasi politik. Peralihan dari Soekarno ke Soeharto tidak dilakukan melalui kudeta militer berdarah secara langsung (seperti di beberapa negara Amerika Latin), melainkan melalui proses "kudeta merangkak" (creeping coup) yang memanfaatkan mekanisme ketatanegaraan melalui MPRS, meskipun berada di bawah tekanan militer yang kuat.

4. Kebijakan Sosial Orde Baru

a. Dalam Negeri

Dalam bidang sosial-politik dalam negeri, Orde Baru menempatkan stabilitas nasional sebagai tujuan utama. Pemerintah meyakini bahwa tanpa stabilitas politik dan keamanan, pembangunan sosial dan ekonomi tidak akan dapat berjalan secara efektif. Oleh karena itu, negara mengambil peran dominan dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. Aktivitas politik masyarakat dibatasi, sementara birokrasi dan aparatur negara didepolitisasi untuk mendukung agenda pembangunan. Menurut M.C. Ricklefs (2008), Orde Baru membangun sistem politik yang terpusat dan terkendali sebagai sarana menciptakan ketertiban sosial setelah periode konflik politik yang panjang.

Kebijakan sosial dalam negeri juga diwujudkan melalui penataan sistem kepartaian dan organisasi kemasyarakatan. Pemerintah mendorong fusi partai politik pada tahun 1973 dan memperkuat Pancasila sebagai satu-satunya asas ideologi negara. Langkah ini bertujuan untuk mencegah bangkitnya kembali konflik ideologi, khususnya komunisme dan ekstremisme politik lainnya. Dalam perspektif Orde Baru,



kebijakan tersebut dipandang sebagai upaya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, meskipun dalam praktiknya sering membatasi kebebasan politik masyarakat.

Di bidang kesejahteraan sosial, Orde Baru meluncurkan kebijakan pembangunan terencana melalui Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Pelita I (1969–1974) difokuskan pada pemulihan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar rakyat. Pemerintah menaruh perhatian besar pada sektor pertanian dengan program intensifikasi pertanian guna mencapai swasembada pangan. Program ini secara langsung berdampak pada kehidupan sosial masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Anne Booth (2012) menilai bahwa keberhasilan awal Orde Baru dalam menekan inflasi dan meningkatkan produksi pangan memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial dan penurunan kemiskinan.

Dalam sektor pendidikan, pemerintah memperluas akses pendidikan dasar melalui pembangunan sekolah-sekolah negeri dan program wajib belajar. Pendidikan dipandang sebagai sarana pembentukan sumber daya manusia yang mendukung pembangunan. Sementara itu, di bidang kesehatan, pemerintah mendirikan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) sebagai fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menjangkau lapisan masyarakat bawah. Kebijakan ini mencerminkan orientasi sosial Orde Baru yang menekankan peningkatan kesejahteraan sebagai bagian dari legitimasi kekuasaan.

Namun demikian, kebijakan sosial Orde Baru dalam negeri juga menuai kritik. Penekanan yang kuat pada stabilitas sering kali diiringi dengan kontrol ketat terhadap kebebasan sipil, seperti pembatasan kebebasan pers dan berpendapat. Negara memposisikan masyarakat lebih sebagai objek pembangunan



daripada subjek yang aktif berpartisipasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan sosial pada masa awal Orde Baru dicapai dengan biaya sosial dan politik yang tidak kecil.

b. Luar Negeri

Dalam kebijakan luar negeri, Orde Baru melakukan reorientasi yang signifikan dibandingkan masa Orde Lama. Pemerintah meninggalkan politik konfrontatif dan kembali menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif secara realistis dan pragmatis. Salah satu langkah awal yang penting adalah kembalinya Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966. Keputusan ini menandai berakhirnya isolasi internasional dan membuka jalan bagi kerja sama sosial dan pembangunan dengan negara lain.

Selain itu, Indonesia berperan aktif dalam pendirian ASEAN pada tahun 1967, yang bertujuan menciptakan stabilitas dan kerja sama regional. Melalui ASEAN, Indonesia memperkuat kerja sama di bidang sosial, pendidikan, dan kebudayaan, yang mendukung pembangunan sumber daya manusia. Menurut Adrian Vickers (2013), stabilitas kawasan Asia Tenggara menjadi faktor penting bagi keberhasilan kebijakan pembangunan sosial Orde Baru.

Kebijakan sosial luar negeri Orde Baru juga diwujudkan melalui keterbukaan terhadap bantuan dan kerja sama internasional. Pemerintah menjalin hubungan dengan negara-negara Barat dan lembaga keuangan internasional seperti Bank Dunia dan IMF. Bantuan luar negeri dimanfaatkan untuk mendanai program pembangunan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Kebijakan ini membantu mempercepat pemulihan ekonomi dan



meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meskipun juga menimbulkan ketergantungan terhadap modal asing.

5. Kebijakan Politik Awal Orde Baru

a. Dalam Negeri

Dalam bidang politik dalam negeri, Orde Baru menekankan stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai fondasi utama pemerintahan. Pemerintah berupaya mengakhiri konflik ideologi yang dianggap sebagai penyebab instabilitas pada masa Orde Lama. Oleh karena itu, negara mengambil langkah-langkah tegas dalam mengendalikan kehidupan politik masyarakat. Pembubaran PKI dan pelarangan ideologi komunisme melalui TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 menjadi langkah awal konsolidasi politik Orde Baru. Menurut Harold Crouch (1978), kebijakan ini memperkuat posisi militer dan negara dalam sistem politik Indonesia.

Orde Baru juga melakukan restrukturisasi sistem kepartaian dan pemilu. Partai politik disederhanakan melalui kebijakan fusi partai pada tahun 1973, sehingga hanya tersisa tiga kekuatan politik utama, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Golkar berfungsi sebagai kendaraan politik utama pemerintah, sementara dua partai lainnya ditempatkan dalam posisi terbatas. Pemilihan umum tetap dilaksanakan secara berkala sejak 1971, namun dalam praktiknya dikontrol ketat oleh negara. Menurut Vedi R. Hadiz (2010), sistem politik Orde Baru bersifat prosedural tetapi tidak sepenuhnya demokratis karena dominasi negara terhadap proses politik.

Dalam kehidupan sosial-politik, pemerintah menerapkan kebijakan depolitisasi massa dan dwifungsi ABRI, di mana militer memiliki peran ganda sebagai kekuatan pertahanan



dan kekuatan sosial-politik. Dwifungsi ABRI dipandang sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan mencegah ancaman terhadap negara. Namun, kebijakan ini juga mempersempit ruang sipil dan memperkuat kontrol negara terhadap masyarakat. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dibatasi demi menjaga “ketertiban umum” dan “kepentingan nasional”.

Selain itu, Orde Baru menegaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi partai politik dan organisasi kemasyarakatan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencegah berkembangnya ideologi yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Dalam praktiknya, kebijakan ini memperkuat legitimasi politik pemerintah sekaligus membatasi pluralisme politik. Ricklefs (2008) menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari strategi Orde Baru dalam menciptakan stabilitas politik jangka panjang.

b. Luar Negeri

Dalam bidang politik luar negeri, Orde Baru melakukan perubahan orientasi yang signifikan dibandingkan masa Orde Lama. Pemerintah meninggalkan politik konfrontatif dan kembali menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif secara pragmatis dan realistis. Tujuan utama kebijakan ini adalah menciptakan lingkungan internasional yang stabil dan kondusif bagi pembangunan nasional. Kembalinya Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1966 menjadi simbol normalisasi hubungan Indonesia dengan dunia internasional.

Indonesia juga memainkan peran penting dalam pembentukan ASEAN pada tahun 1967 bersama Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. ASEAN menjadi wadah kerja sama



politik dan keamanan regional yang bertujuan menjaga stabilitas Asia Tenggara dari konflik ideologi dan intervensi kekuatan besar. Menurut Dewi Fortuna Anwar (2010), peran aktif Indonesia dalam ASEAN mencerminkan kepentingan Orde Baru untuk menjaga stabilitas kawasan demi mendukung stabilitas politik dalam negeri.

Dalam konteks Perang Dingin, Orde Baru mengambil sikap anti-komunisme yang tegas dan menjalin hubungan erat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat. Hubungan ini tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga politik dan keamanan. Dukungan politik dari negara-negara Barat membantu memperkuat posisi internasional Orde Baru, sekaligus memberikan legitimasi terhadap kebijakan politik dalam negeri. Namun, sikap ini juga menempatkan Indonesia dalam orbit kepentingan politik global tertentu. Kebijakan politik luar negeri Orde Baru juga diarahkan untuk meningkatkan citra Indonesia sebagai negara yang stabil dan dapat dipercaya. Pemerintah aktif dalam berbagai forum internasional dan regional untuk memperkuat diplomasi politik dan memperluas kerja sama. Kebijakan ini berhasil mengembalikan kepercayaan dunia internasional terhadap Indonesia, meskipun kritik terhadap pelanggaran hak asasi manusia dan otoritarianisme tetap muncul dari komunitas global.

D. Rangkuman

Peristiwa G30S 1965 berakar dari ketegangan politik yang meningkat tajam pada awal 1960-an, ditandai oleh konflik ideologi antara PKI, TNI AD, dan dinamika internasional Perang Dingin. Prolog peristiwa ini mencakup melemahnya



ekonomi, meningkatnya polarisasi politik akibat strategi Nasakom, serta persaingan memperebutkan pengaruh di sekitar Presiden Soekarno. Semua kondisi ini menciptakan atmosfer penuh kecurigaan dan instabilitas yang memicu terjadinya penculikan serta pembunuhan sejumlah jenderal TNI AD pada 30 September–1 Oktober 1965. Insiden ini kemudian menjadi titik balik politik Indonesia yang mengakhiri dominasi politik PKI dan membuka jalan bagi perubahan besar dalam struktur kekuasaan nasional.

Epilog peristiwa memperlihatkan konsolidasi kekuatan militer, terutama melalui munculnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar) 1966 yang mengalihkan sebagian kewenangan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Penumpasan PKI diikuti gelombang kekerasan luas terhadap anggota dan simpatisan PKI, yang berdampak sosial, politik, dan kemanusiaan sangat besar. Dampaknya terasa panjang: perubahan arah politik menuju Orde Baru, militerisasi pemerintahan, pembatasan kebebasan politik, perubahan kebijakan luar negeri menjadi lebih pro-Barat, serta narasi sejarah resmi yang mendominasi pendidikan dan ruang publik selama lebih dari tiga dekade. Peristiwa ini meninggalkan warisan perpecahan sosial dan kontestasi memori sejarah yang masih diperdebatkan hingga kini.



BAB 2

PEMBANGUNAN DAN STABILITAS: TINJAUAN MULTIDIMENSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN STRATEGIS ERA ORDE BARU

Sindi Nuraeni, Dian Diana Gunawan, Vasra Refinda, dan Haenidar Aghsyeina

Masa Orde Baru hadir setelah Indonesia mengalami krisis multidimensi di bidang politik, ekonomi, dan sosial pada pertengahan 1960-an. Ketidakstabilan tersebut membuat negara berada pada kondisi yang sangat rapuh dan membutuhkan kepemimpinan baru untuk mengembalikan keteraturan nasional. Pada masa itu, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebelumnya menurun drastis sehingga pergantian kekuasaan menjadi tuntutan publik. Situasi inilah yang kemudian membuka jalan bagi naiknya Soeharto sebagai pemimpin baru. Perubahan tersebut membawa harapan untuk memulihkan kehidupan bangsa yang kacau (Halawa, 2022).

Pada fase awal pemerintahannya, Orde Baru memprioritaskan stabilitas sebagai fondasi pembangunan nasional. Pemerintah menilai bahwa tanpa stabilitas politik, perekonomian tidak akan mampu berkembang secara optimal. Oleh karena itu, penataan sistem kenegaraan dilakukan secara bertahap untuk memastikan negara memiliki kendali atas arah pembangunan yang ditempuh. Penataan ini dipandang penting untuk mencegah terulangnya konflik politik yang sebelumnya menghambat pemerintahan. Dengan begitu, negara berupaya menciptakan tatanan politik yang lebih terkendali (Masitho, 2013).



Penataan politik tersebut diwujudkan melalui penyederhanaan kepartaian dan pembatasan aktivitas politik yang dianggap tidak sejalan dengan agenda pembangunan. Pemerintah menilai bahwa kehidupan politik yang terlalu bebas dapat memicu instabilitas sehingga perlu dikendalikan secara ketat. Hal ini kemudian menghasilkan sistem politik yang lebih tertutup tetapi terkoordinasi. Kondisi tersebut membuat pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk menjalankan program pembangunan tanpa gangguan politik. Langkah ini menjadi bagian penting dari strategi penertiban kehidupan nasional (Hadi, 2006).

Ciri menonjol lain dari masa Orde Baru adalah sentralisasi kekuasaan. Pemerintah pusat memegang otoritas penuh dalam merumuskan kebijakan nasional, sementara pemerintah daerah lebih berperan sebagai pelaksana kebijakan. Pengaturan ini dibuat untuk memastikan keseragaman pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Namun, sentralisasi ini juga mengurangi otonomi daerah secara signifikan. Akibatnya, daerah sangat bergantung pada keputusan dari pemerintah pusat (Rajab, 2004).

Di bidang keamanan, pemerintah Orde Baru menempatkan stabilitas domestik sebagai pilar utama pembangunan. Pemerintah mengembangkan sistem keamanan yang terorganisir untuk memastikan pembangunan dapat berjalan tanpa hambatan. Stabilitas dianggap sebagai syarat dasar agar pertumbuhan ekonomi bisa tercapai. Oleh karena itu, aparat keamanan diberi peran besar dalam menjaga ketertiban sosial. Keberadaan sistem keamanan ini menjadi fondasi untuk mempertahankan kontrol negara (Inpantri et al., 2022).

Selain menjaga pertahanan negara, kebijakan keamanan juga diarahkan untuk mengatur dinamika masyarakat. Pengawasan



terhadap organisasi masyarakat diperketat untuk mencegah munculnya gerakan yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas. Pemerintah menekankan pentingnya ketertiban sosial sebagai bagian dari strategi pembangunan. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana keamanan digunakan sebagai alat pengendalian sosial. Hal ini memperlihatkan peran besar negara dalam membentuk kehidupan masyarakat (Saka et al., 2025).

Dalam hubungan luar negeri, pemerintah Orde Baru berupaya memperbaiki citra Indonesia yang sebelumnya terguncang akibat ketidakpastian politik. Pemerintah menilai bahwa keterlibatan aktif dalam dunia internasional dapat membuka peluang kerja sama dan dukungan ekonomi. Oleh karena itu, diplomasi diarahkan agar lebih pragmatis dan terfokus pada hubungan strategis yang berpotensi mendukung pembangunan nasional. Pendekatan ini menjadi langkah penting untuk memperbaiki posisi Indonesia di dunia internasional (Kusuma & Afwan, 2021).

Keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional kembali diperkuat, termasuk perannya dalam PBB serta organisasi dunia lainnya. Pemerintah berupaya menegaskan kembali posisi Indonesia sebagai negara yang stabil dan dapat diandalkan dalam kerja sama global. Selain itu, kebijakan luar negeri Orde Baru mendorong terciptanya stabilitas kawasan, terutama melalui ASEAN. Kemitraan ini membuka ruang kolaborasi dalam bidang politik, ekonomi, dan keamanan, serta membantu memperkuat hubungan regional (Muhammad, 2021).

Perubahan orientasi luar negeri tersebut juga membuka jalan bagi masuknya dukungan ekonomi dari luar negeri. Pemerintah menjalin hubungan dengan IGGI (*Inter*



Governmental Group On Indonesia) , Bank Dunia, dan berbagai lembaga donor untuk memperoleh bantuan pembangunan. Bantuan ini dianggap sebagai modal penting untuk memperbaiki perekonomian Indonesia yang masih lemah. Kerja sama tersebut turut membantu mempercepat modernisasi ekonomi serta membuka peluang pengembangan industri dan infrastruktur (Mohsin, n.d.).

Melalui Repelita, pemerintah menyusun rencana pembangunan jangka panjang sebagai pedoman pembangunan nasional. Setiap tahap Repelita memiliki sasaran berbeda untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada masa itu. Perencanaan terpusat ini menciptakan arah pembangunan yang lebih terstruktur dan sistematis. Pembangunan yang dilakukan mencakup berbagai sektor seperti industri, pertanian, dan perdagangan. Namun demikian, ketimpangan pembangunan antarwilayah masih menjadi persoalan yang mencolok (Wacana Publik STISIPOL, 2023).

Secara keseluruhan, kebijakan politik, ekonomi, luar negeri, dan keamanan pada masa Orde Baru menunjukkan adanya upaya menyeluruh untuk menata ulang arah pembangunan nasional. Pemerintah berusaha menghadirkan stabilitas sebagai fondasi untuk mendorong pertumbuhan nasional. Namun, berbagai kebijakan tersebut juga membawa dampak jangka panjang yang perlu ditelaah secara kritis.



A. Kebijakan Orde Baru Pada Politik Dalam Negeri



Sumber : Dokumentasi Media Antarafoto

Sebelum membahas perkembangan pendidikan kedokteran, penting untuk memahami Masa Orde Baru dimulai setelah keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1966 yang menandai peralihan kekuasaan dari Presiden Soekarno kepada Soeharto. Pemerintahan ini berupaya menegakkan stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai syarat utama pembangunan ekonomi. Langkah awal yang dilakukan adalah menertibkan kehidupan politik, mengontrol organisasi masyarakat, serta menghapus pengaruh komunisme. Upaya tersebut menjadi dasar pembentukan sistem pemerintahan yang kuat secara administratif namun tertutup terhadap oposisi politik (Halawa, 2022).

Kehidupan politik pada masa Orde Baru bersifat sangat terpusat. Pemerintah menilai pluralitas partai sebagai sumber konflik, sehingga dilakukan penyederhanaan menjadi tiga partai: Golkar, PPP, dan PDI. Sistem ini menciptakan stabilitas



politik jangka panjang, tetapi menghilangkan kompetisi yang sehat. Partai politik dijadikan alat legitimasi kebijakan pemerintah, bukan wadah penyalur aspirasi rakyat.

Militer memiliki peran penting dalam politik. Melalui konsep dwifungsi ABRI, militer tidak hanya bertugas menjaga pertahanan, tetapi juga berperan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Keterlibatan militer dianggap mampu menjaga ketertiban, namun sekaligus membatasi kehidupan sipil dan memunculkan tindakan represif di berbagai daerah (Paryanto, 2025).

Kontrol terhadap media massa juga menjadi strategi penting untuk menjaga citra positif pemerintah. Pemerintah memberlakukan sistem izin penerbitan (SIUPP) dan pengawasan ketat terhadap isi pemberitaan. Media diarahkan untuk menampilkan keberhasilan pembangunan dan citra Soeharto sebagai “Bapak Pembangunan”, sementara kritik terhadap pemerintah dibatasi dengan alasan menjaga stabilitas nasional (Hadi, 2006).

Kebijakan pembangunan ekonomi dijadikan sumber legitimasi politik. Program Pembangunan Lima Tahun (Repelita) dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) digulirkan untuk menunjukkan keberhasilan negara. Pertumbuhan ekonomi meningkat dan angka kemiskinan menurun, tetapi kesenjangan sosial antarwilayah juga semakin melebar. Pembangunan yang terpusat di Jawa dan kota besar menimbulkan ketimpangan dengan daerah lain (Rajab, 2004).

Sentralisasi kekuasaan tampak jelas dalam hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah tidak memiliki otonomi luas dan selalu diarahkan oleh kebijakan pusat. Meskipun disebut demokratis, partisipasi masyarakat di



daerah bersifat formalitas karena keputusan penting ditentukan oleh pemerintah pusat. Hal ini menciptakan ketergantungan struktural antara pusat dan daerah.

Kontrol politik juga menjangkau dunia pendidikan. Aktivitas mahasiswa diawasi, dan kampus diarahkan agar tidak menjadi tempat perdebatan politik. Mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah sering kali mendapat tekanan. Kondisi ini melahirkan generasi muda yang cenderung apolitis karena lingkungan akademik dipisahkan dari persoalan sosial-politik (Kurniawan, 2025).

Kekuasaan panjang Soeharto diiringi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak proyek pembangunan dikuasai oleh kroni yang dekat dengan penguasa. Struktur ekonomi seperti ini memperkuat oligarki dan menimbulkan ketimpangan sosial. Akibatnya, pembangunan hanya menguntungkan segelintir elite dan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Hermansyah & Sauki, 2025).

Krisis ekonomi Asia tahun 1997 memperparah kondisi politik dalam negeri. Nilai rupiah anjlok, harga kebutuhan pokok melonjak, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah merosot tajam. Ketidakmampuan Soeharto menanggapi krisis secara efektif memunculkan gerakan reformasi besar-besaran yang akhirnya memaksa dirinya mundur pada Mei 1998 (Masitho, 2013).

Secara keseluruhan, politik dalam negeri masa Orde Baru menghasilkan stabilitas dan pembangunan ekonomi, tetapi dibayar mahal dengan pembatasan kebebasan, dominasi militer, dan sentralisasi kekuasaan. Pemerintahan Orde Baru menekankan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi melalui sistem yang sangat terpusat, di mana kekuasaan



eksekutif menjadi dominan dan mengendalikan seluruh aspek kehidupan bernegara. Hal ini menciptakan birokrasi yang kuat namun tidak transparan serta menumbuhkan budaya politik otoritarian yang masih berpengaruh hingga masa Reformasi. Setelah kejatuhan Soeharto tahun 1998, Indonesia menghadapi tantangan besar untuk mentransformasi sistem politik menuju demokrasi yang lebih partisipatif dan akuntabel, karena warisan struktur kekuasaan dan mentalitas birokratis lama sulit dihapus sepenuhnya (Masitho, 2013).

B. Kebijakan Orde Baru Pada Politik Luar Negeri



Sumber : Dokumentasi arsip UN foto PBB

Masa transisi dari pemerintahan Sukarno ke Soeharto pada periode 1965–1967 menandai perubahan besar dalam arah politik luar negeri Indonesia. Situasi sosial-politik dan ekonomi dalam negeri yang tidak stabil, serta dinamika global pada masa Perang Dingin, mendorong pemerintahan baru untuk



menata kembali orientasi hubungan luar negeri Indonesia. Menurut penelitian dari Universitas Jember, kebijakan luar negeri pada masa ini diarahkan untuk memperbaiki citra dan posisi Indonesia di kancah internasional setelah masa konfrontasi yang melelahkan di era Demokrasi Terpimpin.

Meskipun prinsip “bebas dan aktif” tetap menjadi dasar politik luar negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, implementasinya pada masa Orde Baru mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Pemerintah Soeharto menerapkan pendekatan yang lebih pragmatis, dengan menekankan pentingnya stabilitas politik dan pembangunan ekonomi nasional. Hal ini berarti bahwa Indonesia mulai membuka diri terhadap kerja sama dengan negara-negara Barat, terutama dalam bidang ekonomi dan investasi, tanpa meninggalkan hubungan baik dengan negara-negara berkembang lainnya (Muhammad, 2021)

Salah satu langkah awal yang diambil oleh pemerintahan Orde Baru adalah melakukan normalisasi hubungan luar negeri yang sebelumnya memburuk. Indonesia kembali aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara tetangga. Langkah ini memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang lebih terbuka terhadap kerja sama internasional setelah masa konfrontasi terhadap Malaysia pada awal 1960-an (Mohsin, n.d.).

Dalam bidang ekonomi, politik luar negeri dijadikan alat penting untuk mendorong pembangunan nasional. Pemerintah Orde Baru membentuk Inter- Governmental Group on Indonesia (IGGI), sebuah forum donor internasional yang terdiri dari negara-negara Barat dan lembaga keuangan global seperti Bank Dunia. Melalui forum ini, Indonesia mendapatkan



bantuan modal dan pinjaman luar negeri untuk membiayai program pembangunan lima tahun (Repelita). Strategi ini menunjukkan bagaimana kebijakan luar negeri digunakan untuk mendukung stabilitas ekonomi domestik.(Mohsin, n.d.)

Di tingkat kawasan, Indonesia mengambil peran penting dalam pembentukan Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) pada tahun 1967. Keterlibatan ini mencerminkan keinginan pemerintah Orde Baru untuk menciptakan stabilitas regional dan menghindari konflik ideologis antarnegara di Asia Tenggara. ASEAN kemudian menjadi salah satu pilar utama dalam kebijakan luar negeri Indonesia dan menjadi wadah kerja sama yang memperkuat posisi Indonesia di kawasan tersebut.

Selain aspek diplomatik dan ekonomi, peran militer juga cukup dominan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia pada masa awal Orde Baru. Militer tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan, tetapi juga dalam pengambilan keputusan strategis di bidang hubungan luar negeri. Hal ini berkaitan erat dengan struktur pemerintahan Orde Baru yang menempatkan militer sebagai kekuatan politik utama dalam menjaga stabilitas nasional dan keamanan regional.

Ciri khas politik luar negeri Orde Baru adalah pragmatisme. Pemerintah tidak lagi terjebak dalam orientasi ideologis sebagaimana masa sebelumnya, melainkan lebih fokus pada kepentingan nasional yang berorientasi pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik. Beberapa kajian menyebutkan bahwa

kebijakan luar negeri Indonesia pada periode ini lebih condong kepada negara- negara Barat, terutama Amerika Serikat dan



Jepang, yang menjadi mitra utama dalam pembangunan ekonomi nasional (Setyowati, 2023).

Namun demikian, pendekatan ini juga melahirkan sejumlah kritik. Ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing melalui IGGI dan lembaga keuangan internasional membuat perekonomian Indonesia rentan terhadap tekanan eksternal. Selain itu, kebijakan luar negeri yang sangat sentralistik di bawah kendali Soeharto mencerminkan karakter otoritarian dari sistem politik dalam negeri pada masa itu. Hal ini berdampak pada terbatasnya partisipasi masyarakat dalam menentukan arah diplomasi nasional.

Keterkaitan antara politik dalam negeri dan kebijakan luar negeri juga menjadi karakteristik penting dari masa Orde Baru. Stabilitas politik dan keamanan domestik menjadi pertimbangan utama dalam merumuskan kebijakan luar negeri. Menurut penelitian dari Universitas Nasional Jakarta, diplomasi Indonesia pada masa itu sangat dipengaruhi oleh kepentingan rezim dalam menjaga legitimasi kekuasaan dan citra positif di dunia internasional (Kusuma & Afwan, 2021).

Menjelang akhir kekuasaan Orde Baru, perubahan global seperti berakhirnya Perang Dingin dan munculnya era globalisasi menuntut Indonesia untuk menyesuaikan kebijakan luar negerinya. Krisis ekonomi Asia tahun 1997–1998 dan tekanan reformasi di dalam negeri mempercepat berakhirnya rezim Soeharto. Meski demikian, warisan politik luar negeri Orde Baru seperti orientasi pragmatis, fokus pada pembangunan ekonomi, dan komitmen terhadap stabilitas kawasan masih memengaruhi arah diplomasi Indonesia hingga periode Reformasi (Muhammad, 2021).



C. Kondisi Perekonomian Pada Masa Orde Baru



Sumber : Dokumentasi arsip UN foto PBB

Pada awal masa Orde Baru (1966–1968), Indonesia menghadapi krisis ekonomi yang sangat berat akibat kebijakan ekonomi yang tidak stabil pada masa pemerintahan sebelumnya. Hiperinflasi mencapai lebih dari 600%, utang luar negeri menumpuk, dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan menurun drastis. Kondisi ini diperburuk dengan lemahnya perbankan nasional dan menurunnya produksi dalam negeri. Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto kemudian memprioritaskan stabilisasi ekonomi melalui kebijakan pengetatan fiskal dan moneter, serta mengundang kembali para teknokrat ekonomi untuk merumuskan langkah-langkah penyelamatan ekonomi nasional (Wuriyanti & Nasution, 2013).

Sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka panjang, pemerintah Orde Baru memperkenalkan Rencana



Pembangunan Lima Tahun (Repelita) yang dimulai pada 1969. Tujuan utama Repelita adalah menciptakan stabilitas ekonomi dan politik sebagai dasar pembangunan nasional. Pemerintah menerapkan kebijakan ekonomi campuran, yaitu menggabungkan peran negara yang kuat dengan mekanisme pasar. Dalam hal ini, negara berfungsi sebagai pengarah dan pengendali pembangunan, sementara sektor swasta dan investor asing diberi ruang untuk berkembang. (Shodiq & Maula, 2025)

Keberhasilan awal Orde Baru ditandai dengan penurunan inflasi secara signifikan dari ratusan persen menjadi di bawah 20% dalam beberapa tahun, serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Keberhasilan ini sering disebut sebagai “keajaiban ekonomi Indonesia”, karena menunjukkan kemampuan pemerintah menstabilkan ekonomi setelah masa krisis yang panjang. Faktor utama keberhasilan ini adalah konsistensi kebijakan fiskal, dukungan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia, serta disiplin moneter yang ketat (Shodiq & Maula, 2025).

Pada sektor industri dan perdagangan, pemerintah Orde Baru menekankan strategi industrialisasi berbasis ekspor dan pembangunan infrastruktur. Investasi asing mulai masuk besar-besaran melalui Undang- Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967. Kebijakan ini berhasil meningkatkan produksi manufaktur dan menurunkan ketergantungan terhadap impor. Namun, banyak kalangan mengkritik bahwa pembangunan tersebut terlalu bergantung pada modal asing dan bahan mentah, sehingga tidak berkelanjutan dalam jangka panjang (Nasution, 2014).

Selain industrialisasi, pemerintah Orde Baru juga berusaha memperkuat sektor pertanian melalui program Revolusi Hijau.



Program ini meningkatkan produksi pangan terutama beras, sehingga pada awal 1980-an Indonesia sempat mencapai swasembada beras. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan dampak sosial seperti kesenjangan antara petani besar dan kecil akibat ketimpangan akses terhadap pupuk dan teknologi. Keberhasilan sektor pertanian ini menjadi simbol keberhasilan pembangunan Orde Baru, meskipun tidak semua lapisan masyarakat menikmatinya secara merata (Aryanto, 2023).

Faktor politik dan stabilitas keamanan menjadi unsur penting dalam kebijakan ekonomi Orde Baru. Pemerintah Soeharto menciptakan sistem politik yang sentralistik dan otoriter demi menjamin stabilitas nasional. Stabilitas ini dianggap sebagai prasyarat bagi investasi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Namun, di balik kestabilan tersebut, muncul praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) yang mengakar kuat di birokrasi dan dunia usaha (Ma'arif, 2018).

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Pembangunan yang bersifat sentralistik menyebabkan kesenjangan antar daerah semakin lebar, terutama antara Jawa dan luar Jawa. Selain itu, kebijakan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan (growth oriented) menyebabkan aspek sosial dan pemerataan ekonomi terabaikan. Akibatnya, sebagian besar kekayaan nasional terkonsentrasi pada kelompok elite politik dan konglomerat yang dekat dengan kekuasaan (Nasution, 2014).

Ketergantungan terhadap utang luar negeri juga menjadi ciri ekonomi Orde Baru. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga internasional seperti Bank Dunia dan IMF untuk memperoleh pinjaman guna membiayai proyek- proyek pembangunan. Walaupun utang ini membantu meningkatkan pembangunan infrastruktur dan produktivitas nasional, di sisi lain



menimbulkan ketergantungan ekonomi terhadap pihak asing. Ketika krisis keuangan Asia terjadi pada tahun 1997, beban utang dan lemahnya fundamental ekonomi membuat Indonesia tidak mampu bertahan (Firdaus & Megantara, 2022).

Privatisasi dan reformasi BUMN yang dilakukan pada masa akhir Orde Baru juga tidak berjalan efektif karena adanya intervensi politik dan kepentingan ekonomi keluarga penguasa. Banyak kebijakan ekonomi dijalankan bukan untuk efisiensi, tetapi untuk memperkuat jaringan patronase ekonomi-politik yang menopang rezim Soeharto. Akibatnya, ekonomi menjadi tidak efisien dan tidak transparan, meskipun di permukaan terlihat stabil dan berkembang (Ma'arif, 2018).

Krisis moneter Asia 1997 menjadi titik balik yang mengakhiri masa kejayaan ekonomi Orde Baru. Nilai rupiah anjlok, inflasi melonjak, dan sektor perbankan kolaps. Dampak sosial ekonomi dari krisis tersebut sangat besar, termasuk meningkatnya pengangguran dan kemiskinan. Krisis ini juga memperlihatkan kelemahan struktural ekonomi Indonesia yang selama ini tersembunyi di balik pertumbuhan tinggi (Rajab, 2002).

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada masa Orde Baru dapat dikatakan mengalami paradoks: di satu sisi berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabilitas politik, namun di sisi lain gagal menciptakan pemerataan dan keberlanjutan. Model pembangunan yang top-down dan sangat terpusat pada negara berhasil membangun fondasi ekonomi, tetapi juga menimbulkan kesenjangan dan ketergantungan struktural yang tinggi. Paradigma ini kemudian menjadi bahan refleksi penting bagi masa Reformasi setelah 1998 (Shodiq & Maula, 2025).



D. Kondisi Keamanan pada Masa Orde Baru



Sumber : Dokumentasi Wikipedia.com

Pada awal masa Orde Baru, pemerintah di bawah kepemimpinan Soeharto menjadikan stabilitas keamanan sebagai fondasi utama dalam membangun negara. Setelah kekacauan politik dan konflik sosial pasca-1965, keamanan dianggap kunci untuk menciptakan ketertiban nasional. Pemerintah mengambil langkah tegas dengan melarang organisasi yang dianggap berbahaya seperti PKI serta melakukan pembersihan terhadap unsur-unsur yang dianggap mengancam stabilitas nasional. Pendekatan ini menciptakan sistem politik yang stabil, namun sekaligus membuka ruang bagi tindakan represif negara terhadap masyarakat sipil (Halawa, 2022).

Militer menjadi tulang punggung dalam menjaga keamanan nasional melalui konsep Dwifungsi ABRI, yaitu peran ganda militer sebagai kekuatan pertahanan dan kekuatan sosial



politik. Konsep ini menempatkan militer dalam posisi strategis di berbagai lembaga pemerintahan dan ekonomi. Dengan demikian, keamanan tidak hanya menjadi urusan militer tetapi juga instrumen politik untuk mempertahankan kekuasaan. Konsep ini dijelaskan secara rinci dalam penelitian tentang peran ABRI pada masa Orde Baru, yang menegaskan pentingnya peran militer dalam menjaga stabilitas dan legitimasi pemerintahan Soeharto (Inpantri et al., 2022).

Untuk memperkuat sistem keamanan, pemerintah membentuk lembaga khusus seperti Kopkamtib (Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban) yang memiliki kewenangan luas dalam mengawasi masyarakat. Lembaga ini berperan penting dalam menekan potensi gerakan yang dianggap subversif. Dalam praktiknya, aparat sering menggunakan pendekatan koersif, termasuk pengawasan terhadap media dan aktivitas sosial. Pengendalian terhadap pers menjadi bagian dari strategi keamanan negara, sebagaimana dijelaskan dalam penelitian tentang dinamika pers pada masa Orde Baru yang menunjukkan adanya tekanan besar terhadap kebebasan media demi stabilitas nasional (Maulana et al., 2023).

Program keamanan juga diwujudkan dalam kegiatan sosial seperti ABRI Masuk Desa (AMD) yang bertujuan menguatkan hubungan antara militer dan masyarakat di pedesaan. Meskipun program ini membawa manfaat pembangunan fisik, secara politis AMD juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan memperluas pengaruh militer hingga ke pelosok. Program tersebut menunjukkan bahwa keamanan di masa Orde Baru tidak hanya difokuskan pada aspek militer, tetapi juga merambah kehidupan sosial masyarakat di tingkat lokal (Laksana, 2025).



Sistem keamanan yang dibangun Orde Baru sering kali mengabaikan prinsip hak asasi manusia. Pemerintah menggunakan pendekatan panoptikon — sistem pengawasan menyeluruh yang membuat masyarakat selalu merasa diawasi. Hal ini tercermin dalam pembatasan aktivitas politik, pengekangan kebebasan berekspresi, dan pembungkaman kritik terhadap pemerintah. Pendekatan seperti ini, menurut analisis semiotik dalam kajian sastra politik, menjadi simbol kekuasaan yang represif di era Orde Baru (Saka et al., 2025).

Dalam menghadapi konflik sosial, pemerintah cenderung menggunakan kekuatan keamanan sebagai solusi utama. Peristiwa-peristiwa seperti Tragedi Tanjung Priok 1984 dan Kerusuhan 1996 (Kudatuli) memperlihatkan bagaimana aparat keamanan terlibat langsung dalam penanganan politik yang berujung pada kekerasan. Pendekatan keamanan yang mengutamakan kekuatan daripada dialog ini mencerminkan lemahnya sistem demokrasi di masa itu (Kurniawan, 2025).

Keterlibatan aparat keamanan juga merambah birokrasi sipil. Banyak pejabat sipil berasal dari kalangan militer, terutama di daerah-daerah strategis. Militer menjadi bagian dari struktur pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Penelitian tentang peran tentara dalam politik menegaskan bahwa sistem ini menjadikan keamanan dan kekuasaan politik saling bertumpu satu sama lain.

Meski menciptakan stabilitas dalam jangka pendek, sistem keamanan Orde Baru membawa dampak negatif terhadap perkembangan demokrasi dan kehidupan sipil. Struktur keamanan yang terintegrasi dengan kekuasaan politik menghambat transparansi dan akuntabilitas. Menurut analisis politik kontemporer, sistem keamanan ini memperkuat



budaya otoritarian dan birokratis yang masih berpengaruh bahkan setelah Reformasi 1998 (Rajab, 2004).

Selain aspek politik, keamanan juga dikaitkan dengan pembangunan ekonomi. Pemerintah memandang pembangunan sebagai bagian dari strategi menjaga stabilitas nasional. Namun dalam praktiknya, pendekatan ini menciptakan ketimpangan ekonomi karena banyak proyek pembangunan dikuasai oleh militer dan kroni pemerintah. Hubungan antara keamanan dan ekonomi di era Soeharto mencerminkan bagaimana militer turut mengendalikan aspek ekonomi untuk menjaga kestabilan kekuasaan (Baru & Untarawati, 2024).

Secara keseluruhan, kebijakan keamanan pada masa Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi, tetapi dengan mengorbankan kebebasan dan hak asasi manusia. Pengawasan ketat, peran besar militer, dan pengekanan terhadap partisipasi masyarakat menjadikan keamanan sebagai instrumen kekuasaan. Warisan sistem keamanan ini masih terasa hingga masa Reformasi, ketika pemerintah harus menghadapi tantangan menyeimbangkan antara kebutuhan stabilitas nasional dan penghormatan terhadap kebebasan sipil.

E. Dampak Kebijakan Orde Baru

Kebijakan Orde Baru membawa perubahan besar dalam tatanan politik, ekonomi, sosial, dan hukum di Indonesia. Pemerintah berusaha menciptakan stabilitas politik melalui kontrol yang ketat terhadap partai, media, dan masyarakat, sementara pembangunan ekonomi dijalankan dengan menarik



investasi dan memperkuat proyek berskala besar. Namun, keberhasilan pembangunan tersebut juga disertai ketimpangan, munculnya praktik KKN, serta pembatasan terhadap kebebasan sipil. Kebijakan sosial dan keamanan negara pun sering digunakan untuk meredam kritik, sehingga pelanggaran hak asasi manusia kerap terjadi. Berikut berbagai dampak Orde Baru.



Sumber : Dokumentasi inews.id

1. Dampak dibidang Politik

Kebijakan Orde Baru berdampak pada menguatnya kekuasaan eksekutif dan melemahnya fungsi kontrol politik. Melalui depolitisasi masyarakat, pembatasan partai politik, dan dominasi Golkar, pemerintah berhasil menciptakan stabilitas politik yang terkendali namun mengorbankan demokrasi. Sentralisasi kekuasaan membuat kritik terhadap negara dianggap ancaman keamanan, sehingga ruang kebebasan sipil menyempit (Aspinall, 2005).



2. Dampak dibidang Ekonomi

Secara ekonomi, Orde Baru membawa pertumbuhan pesat terutama pada era 1970–1990 lewat stabilisasi makro dan investasi asing. Namun kebijakan pembangunan yang berorientasi pada konglomerasi menciptakan ketimpangan pendapatan, korupsi struktural, dan ketergantungan pada utang luar negeri. Krisis 1997 mengungkap rapuhnya fondasi ekonomi akibat praktik KKN yang melekat pada birokrasi dan pengusaha kroni (Robison & Hadiz, 2004).

3. Dampak dibidang Sosial

Di bidang sosial, pembangunan Orde Baru meningkatkan angka melek huruf, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Namun kontrol negara terhadap organisasi masyarakat, pembatasan kebebasan berekspresi, dan indoktrinasi melalui sistem pendidikan (seperti Penataran P4) menciptakan homogenisasi sosial. Kebijakan transmigrasi juga menimbulkan ketegangan antarkelompok di beberapa daerah (Heryanto, 1999).

4. Dampak dibidang Hukum dan Ham

Kebijakan keamanan Orde Baru memunculkan pelanggaran HAM seperti pembungkaman media, penangkapan tanpa proses hukum, dan tindakan represif terhadap oposisi. Instrumen hukum banyak digunakan untuk melindungi stabilitas negara ketimbang menjamin hak warga. Peristiwa Talangsari, DOM Papua–Aceh, dan kasus penculikan aktivis menunjukkan bagaimana hukum berfungsi secara represif (Crouch, 2010).



F. Rangkuman

Kebijakan Orde Baru memberikan dampak besar dan menyeluruh terhadap kehidupan politik, ekonomi, sosial, keamanan, serta sistem hukum Indonesia. Dalam bidang politik, pemerintah berhasil menciptakan stabilitas melalui sentralisasi kekuasaan, penyederhanaan partai, kontrol media, serta peran dominan militer melalui Dwifungsi ABRI. Namun stabilitas tersebut dicapai dengan mengorbankan demokrasi, menghambat kebebasan sipil, dan memunculkan budaya politik otoritarian.

Pada bidang ekonomi, pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan melalui Repelita, investasi asing, serta industrialisasi memang berhasil menurunkan inflasi dan meningkatkan pendapatan nasional. Meski demikian, keberhasilan tersebut tidak merata dan justru menimbulkan ketergantungan terhadap utang luar negeri, munculnya konglomerasi, serta praktik KKN yang mengakar dalam struktur birokrasi.

Secara sosial, masyarakat mengalami peningkatan kualitas hidup seperti akses pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Namun di sisi lain, masyarakat juga menghadapi represi negara melalui kontrol ketat terhadap organisasi sosial, pembatasan ruang ekspresi, dan indoktrinasi ideologi yang menghambat dinamika sosial yang lebih demokratis.

Dari aspek keamanan, rezim Orde Baru menciptakan stabilitas nasional dengan membentuk sistem pengawasan ketat, memperluas peran militer, dan menggunakan instrumen keamanan sebagai alat menjaga kekuasaan. Pendekatan ini berdampak pada berbagai pelanggaran HAM yang menguatkan citra negara yang represif.



Secara keseluruhan, Orde Baru meninggalkan dualitas antara keberhasilan pembangunan dan problem mendasar dalam demokrasi, pemerataan, serta perlindungan hak asasi manusia. Warisan sistem politik dan ekonomi tersebut menjadi tantangan besar bagi era Reformasi dalam membangun pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan berkeadilan.



BAB 3

PERISTIWA (MALARI) MALAPETAKA 15 JANURI 1974

Rahma Diva Januar Dini, Feni Febriani, Rina Sulistiani, dan M. Gibbran

A. Kondisi Politik dan Ekonomi Indonesia Menjelang Peristiwa Malari

Pada awal dekade 1970-an, Indonesia memasuki tahap konsolidasi kekuasaan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Stabilitas politik dikonstruksikan sebagai fondasi utama pembangunan nasional, terutama untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi masuknya investasi asing. Namun, di balik upaya tersebut, tersimpan berbagai ketegangan struktural yang secara perlahan membentuk latar belakang sosial-politik Peristiwa Malari. Dalam ranah politik, Orde Baru menerapkan pola pemerintahan yang semakin sentralistis dengan memperkuat kontrol negara terhadap partai politik, parlemen, serta organisasi kemasyarakatan. Kebijakan depolitisasi dijalankan untuk membatasi partisipasi politik masyarakat, dengan alasan menjaga ketertiban dan stabilitas nasional. Konsekuensinya, ruang ekspresi politik menyempit dan kritik khususnya dari kalangan mahasiswa dan intelektual dipersepsikan sebagai ancaman terhadap kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan akumulasi ketidakpuasan yang tidak memperoleh saluran politik yang memadai. (Sahasrad & Ridwan, 2020)

Sementara itu, strategi pembangunan ekonomi Orde Baru sangat bergantung pada modal asing, terutama dari Jepang,



yang berperan dominan dalam proyek industri dan infrastruktur. Meskipun kebijakan tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi, manfaatnya tidak terdistribusi secara merata. Ketimpangan sosial semakin nyata, diiringi menguatnya praktik korupsi, kolusi, dan monopoli oleh elite ekonomi-politik yang dekat dengan pusat kekuasaan. Arus masuk modal dan produk asing juga menimbulkan kekhawatiran akan ketergantungan ekonomi dan melemahnya kedaulatan nasional. Dalam konteks ini, tekanan ekonomi berupa kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan penurunan daya beli masyarakat memperdalam ketegangan sosial yang akhirnya meledak dalam Peristiwa Malari 1974.

Kondisi politik yang represif dan ketimpangan ekonomi inilah yang menjadi latar sosial dari munculnya demonstrasi mahasiswa. Mereka melihat bahwa pembangunan ekonomi yang diagungkan pemerintah tidak diimbangi dengan pemerataan kesejahteraan dan keterbukaan politik. Akumulasi ketegangan ini menciptakan suasana nasional yang rawan terhadap ledakan sosial, yang akhirnya meledak dalam Peristiwa Malari.

B. Latar Belakang Munculnya Gerakan Mahasiswa

Gerakan mahasiswa pada awal 1970-an lahir sebagai respons kritis terhadap kondisi politik dan ekonomi di bawah pemerintahan Orde Baru. Berangkat dari tradisi historis sebagai kekuatan moral, mahasiswa memosisikan diri sebagai kelompok yang menuntut penyelenggaraan negara yang bersih, adil, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Ketidakpuasan utama mahasiswa tertuju pada kebijakan pembangunan yang dinilai elitis dan tidak merata. Masuknya



investasi asing, khususnya dari Jepang, dipandang lebih menguntungkan kelompok penguasa dan pengusaha dekat rezim, sementara kesejahteraan rakyat kecil terabaikan. Praktik *monopoly capitalism* serta meningkatnya ketimpangan sosial-ekonomi memperkuat kritik mahasiswa terhadap narasi keberhasilan pembangunan yang dikampanyekan pemerintah (Januar, 2003).

Di bidang politik, menguatnya otoritarianisme Orde Baru melalui pembatasan kebebasan berpendapat, pengetatan ruang demokrasi, dan pengawasan terhadap organisasi masyarakat mendorong mahasiswa untuk melakukan perlawanan. Kondisi ini diperparah oleh konflik internal di kalangan elite Orde Baru yang menciptakan ketidakpastian arah kebijakan negara dan menunjukkan melemahnya komitmen terhadap keadilan serta kedaulatan rakyat. Dengan landasan idealisme dan tanggung jawab moral, mahasiswa kemudian memobilisasi aksi-aksi demonstrasi yang tidak hanya menuntut perbaikan ekonomi, tetapi juga reformasi moral dan politik. Dinamika inilah yang menjadi konteks penting bagi munculnya gerakan mahasiswa dan berujung pada mobilisasi besar menjelang Peristiwa Malari. (Gesmi & Hendri, 2018).

C. Kunjungan Perdana Menteri Jepang dan Pemicunya

Kunjungan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, ke Indonesia pada Januari 1974 menjadi pemicu langsung meletusnya Peristiwa Malari. Meski secara resmi merupakan bagian dari diplomasi ekonomi Jepang di Asia Tenggara, kunjungan ini justru memicu gelombang penolakan luas, terutama dari kalangan mahasiswa. Penolakan tersebut



berakar pada dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. Pada awal 1970-an, Jepang tampil sebagai investor asing terbesar yang menguasai sektor-sektor strategis seperti otomotif, elektronika, dan industri dasar. Mahasiswa memandang dominasi ini sebagai bentuk kolonialisme ekonomi baru, di mana Indonesia berperan sebagai pasar sementara keuntungan mengalir ke luar negeri. Ketergantungan pemerintah Orde Baru pada investasi dan pinjaman Jepang semakin memperkuat kritik terhadap arah pembangunan nasional.(Kashiwabara, 2016).

Kunjungan Tanaka kemudian dimaknai sebagai simbol menguatnya pengaruh Jepang dalam perekonomian Indonesia. Isu ketergantungan ekonomi, ancaman terhadap industri lokal, serta kesejahteraan rakyat menjadi fokus utama kritik mahasiswa. Di sisi lain, dimensi politik turut memperuncing penolakan, terutama terkait kedekatan elite Orde Baru dengan pengusaha Jepang yang dinilai mengabaikan kepentingan nasional. Aksi-aksi demonstrasi yang direncanakan bertepatan dengan kedatangan Tanaka dimaksudkan sebagai pernyataan politik terhadap model pembangunan yang tidak adil. Namun, meningkatnya pengamanan aparat dan ketegangan politik internal elite Orde Baru menyebabkan situasi memanas. Momentum kunjungan inilah yang akhirnya menjadi pemicu langsung terjadinya mobilisasi besar mahasiswa dan meledaknya kerusuhan massal pada 15 Januari 1974. (Kashiwabara, 2016).

D. Kronologi Peristiwa Malari 15 Januari 1974

Peristiwa Malari mencapai puncaknya pada 15 Januari 1974, meskipun rangkaian dinamika gerakan telah berkembang



sejak beberapa hari sebelumnya. Menjelang kedatangan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka, mahasiswa di berbagai kampus besar seperti Universitas Indonesia dan Institut Teknologi Bandung melakukan konsolidasi dan penyusunan tuntutan. Fokus gerakan diarahkan pada penolakan kapitalisme asing, kritik terhadap korupsi, serta kekecewaan terhadap kebijakan pembangunan Orde Baru. Sejumlah aksi pendahuluan telah berlangsung pada 14 Januari sebagai bentuk pemanasan menjelang demonstrasi besar. Pada hari puncak, ribuan mahasiswa bergerak dari kampus UI Salemba menuju Monas dan pusat-pusat strategis Jakarta. Aksi awal berlangsung tertib dan damai, ditandai dengan orasi, poster, dan spanduk yang menyoroti dominasi ekonomi Jepang serta ketergantungan pemerintah pada kepentingan asing. Namun, seiring membesarnya massa, situasi mulai sulit dikendalikan. Kelompok di luar mahasiswa masuk ke dalam kerumunan, gesekan dengan aparat meningkat, dan dugaan provokasi memperburuk keadaan. (Suwirta, 2018).

Menjelang siang hingga sore hari, demonstrasi berubah menjadi kerusuhan massal. Toko-toko milik pengusaha keturunan Tionghoa dan kendaraan buatan Jepang menjadi sasaran perusakan dan pembakaran. Kerusuhan meluas di berbagai kawasan Jakarta, seperti Senen dan Glodok, menandai pecahnya kekacauan yang tidak lagi dapat dikendalikan oleh ketua aksi. Menjelang malam, pemerintah mengambil alih situasi dengan mengerahkan pasukan dalam jumlah besar. Jalan-jalan utama diblokade, massa dibubarkan, dan keamanan diperketat. Kerusuhan berhasil dipadamkan, namun meninggalkan kerusakan material yang luas serta korban luka dan jiwa. Pasca peristiwa, pemerintah menerapkan langkah-langkah represif melalui penangkapan aktivis mahasiswa, pembekuan aktivitas kampus, dan



pembredelan media kritis. Peristiwa Malari kemudian dijadikan dasar untuk memperketat kontrol politik, dengan narasi resmi yang menuding adanya aktor-aktor politik di balik kerusuhan tersebut.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Kerusuhan Massal

Kerusuhan dalam Peristiwa Malari merupakan akumulasi dari berbagai ketegangan politik, ekonomi, dan sosial yang telah lama berkembang. Peristiwa ini tidak dapat dipahami sebagai ledakan spontan, melainkan sebagai hasil dari pertemuan sejumlah faktor struktural dan situasional yang saling memperkuat. Ketimpangan ekonomi dan sosial menjadi latar utama eskalasi kerusuhan. Pada awal 1970-an, manfaat pembangunan Orde Baru dirasakan tidak merata. Pertumbuhan ekonomi lebih menguntungkan elite dan pengusaha besar, sementara masyarakat luas menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, pengangguran, dan lemahnya daya beli. Kondisi ini menciptakan frustrasi sosial yang mudah berubah menjadi kemarahan kolektif. Dominasi modal asing, khususnya Jepang, turut memperkuat ketegangan. Kehadiran perusahaan dan produk Jepang dalam skala besar dipersepsikan sebagai bentuk kolonialisme ekonomi baru. Sentimen anti-Jepang berkembang luas dan menemukan ekspresi konkret melalui penyerangan terhadap simbol-simbol ekonomi yang diasosiasikan dengan kekuatan asing.

Ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting. Pemerintah Orde Baru dinilai terlalu berpihak pada modal dan menutup ruang partisipasi politik melalui kebijakan depolitisasi. Akibatnya, demonstrasi



mahasiswa menjadi saluran alternatif bagi berbagai kelompok sosial untuk menyalurkan keresahan yang terakumulasi. Situasi semakin diperburuk oleh konflik internal elite Orde Baru. Persaingan antar faksi kekuasaan melemahkan koordinasi dan kejelasan komando aparat keamanan, sehingga pengendalian massa tidak berjalan efektif. Masuknya massa non-mahasiswa termasuk provokator, kelompok oportunistis, dan masyarakat yang terdorong oleh tekanan ekonomi mengubah aksi mahasiswa yang semula terorganisasi menjadi kerusuhan anarkis. Lemahnya penanganan aparat keamanan, baik dalam pencegahan maupun pengendalian situasi, mempercepat eskalasi kekerasan. Dalam konteks tersebut, sentimen sosial berbasis etnis turut muncul, meskipun bukan sebagai penyebab utama. Kerusuhan yang menyasar kelompok tertentu menunjukkan adanya ketegangan sosial laten yang telah lama terpendam dan kemudian meledak dalam situasi krisis.(Fathonah et al., 2023).

F. Dampak Peristiwa Malari terhadap Pemerintahan Orde Baru

Peristiwa Malari menjadi titik balik penting dalam dinamika politik Orde Baru. Kerusuhan tersebut dipandang pemerintah sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan legitimasi kekuasaan, sehingga mendorong diterapkannya berbagai kebijakan represif serta penyesuaian strategi politik guna memperkuat kendali negara. Pasca-Malari, pemerintah memperketat kontrol politik secara signifikan. Ruang kebebasan bagi mahasiswa, organisasi masyarakat, dan publik dipersempit, sementara kebijakan depolitisasi diperkuat untuk mencegah munculnya kembali mobilisasi massa yang



kritis. Kampus menjadi sasaran utama pengawasan melalui pembatasan organisasi dan aktivitas mahasiswa. Demonstrasi dan diskusi politik diawasi ketat, banyak aktivis ditangkap, dan gerakan mahasiswa mengalami pelemahan struktural.

Di bidang media, pemerintah meningkatkan pengendalian pers. Sejumlah media dibredel dan sistem perizinan diperketat, memaksa pers tunduk pada narasi resmi negara. Kebebasan pemberitaan menyempit, seiring upaya pemerintah meredam kritik dan mengendalikannya opini publik.

Peristiwa Malari juga berdampak pada struktur keamanan negara. Pemerintah melakukan perombakan dan pencopotan pejabat tertentu, sekaligus memperkuat kendali Presiden Soeharto atas militer. Langkah ini mengurangi potensi oposisi internal dan menegaskan dominasi kekuasaan eksekutif. Bersamaan dengan itu, sistem pemerintahan semakin tersentralisasi, dengan pengambilan keputusan politik terkonsentrasi pada lingkaran elite yang loyal.

Dalam bidang ekonomi, pemerintah melakukan penyesuaian simbolik terhadap arah pembangunan. Meskipun ketergantungan pada modal asing tetap berlanjut, kebijakan pembangunan ditampilkan dengan wajah yang lebih nasionalistis untuk meredam kritik publik. Secara keseluruhan, Peristiwa Malari mempercepat konsolidasi otoritarianisme Orde Baru dan menandai penyempitan ruang demokrasi dalam kehidupan politik Indonesia (Jafar & Aisyah, 2022).



G. Pengaruh Malari terhadap Gerakan Mahasiswa dan Media Massa

Peristiwa Malari membawa dampak mendalam terhadap dinamika gerakan mahasiswa dan kebebasan pers di Indonesia. Pemerintah Orde Baru memandang mahasiswa dan media massa sebagai aktor penting dalam meningkatnya tekanan sosial-politik menjelang kerusuhan, sehingga kebijakan pasca-Malari diarahkan untuk membatasi dan mengendalikan peran kritis keduanya. Di lingkungan kampus, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan pembatasan organisasi dan aktivitas kemahasiswaan. Melalui regulasi seperti Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK), mahasiswa diarahkan menjauh dari kegiatan politik dan dibatasi hanya pada aktivitas akademik. Organisasi ekstra kampus diawasi ketat, sementara demonstrasi dan diskusi politik dicurigai sebagai aktivitas subversive (Hardita et al., 2023).

Pengawasan terhadap kehidupan kampus diperkuat dengan keterlibatan aparat keamanan. Ruang diskusi intelektual menyempit, sejumlah dosen dan aktivis mahasiswa mengalami tekanan administratif maupun politik, dan kampus kehilangan fungsinya sebagai ruang bebas pertukaran gagasan. Akibatnya, gerakan mahasiswa mengalami pelemahan dan fragmentasi. Banyak tokoh kunci tersingkir, sehingga kemampuan mobilisasi massa menurun dan semangat aktivisme mahasiswa merosot dalam jangka panjang. Di sisi lain, media massa juga menjadi sasaran pengetatan kontrol negara. Pembredelan media kritis dan pencabutan izin penerbitan dilakukan untuk memastikan pers tunduk pada narasi resmi pemerintah. Pengawasan isi pemberitaan diperketat, mendorong praktik sensor diri di kalangan jurnalis. Pers tidak



lagi berfungsi sebagai pengawas kekuasaan, melainkan sebagai alat legitimasi negara. Secara keseluruhan, dampak Peristiwa Malari memperkuat karakter otoriter pemerintahan Orde Baru dan mempersempit ruang kebebasan berpendapat. Gerakan mahasiswa dan pers sebagai pilar masyarakat sipil mengalami kemunduran yang berlangsung lama. Baru menjelang akhir 1990-an, kedua kekuatan ini kembali muncul sebagai aktor penting dalam mendorong perubahan politik dan runtuhnya Orde Baru (Jum'at & Firdaus, 2022).

H. Rangkuman

Peristiwa Malari 1974 merupakan refleksi dari akumulasi ketegangan struktural yang berkembang dalam konteks politik dan ekonomi Orde Baru pada awal dekade 1970-an. Konsolidasi kekuasaan yang bersifat sentralistis dan represif, dipadukan dengan strategi pembangunan ekonomi yang bertumpu pada modal asing, menciptakan ketimpangan sosial serta menyempitkan ruang partisipasi politik. Dalam kondisi tersebut, gerakan mahasiswa tampil sebagai ekspresi kritik moral terhadap ketidakadilan ekonomi, dominasi asing, dan praktik kekuasaan yang semakin menjauh dari aspirasi rakyat.

Kunjungan Perdana Menteri Jepang Kakuei Tanaka menjadi pemicu situasional yang mempercepat ledakan ketegangan sosial yang telah lama terpendam. Demonstrasi mahasiswa yang semula terorganisasi dan bermuatan kritik struktural berkembang menjadi kerusuhan massal akibat masuknya aktor non-mahasiswa, lemahnya pengendalian aparat, serta konflik internal elite Orde Baru. Peristiwa ini menegaskan bahwa stabilitas yang dibangun negara bersifat rapuh dan



bergantung pada kontrol represif, bukan pada konsensus sosial yang inklusif.

Dampak Peristiwa Malari menunjukkan arah respons negara yang semakin otoriter. Alih-alih membuka ruang koreksi dan dialog, pemerintah memperketat kontrol terhadap mahasiswa, pers, dan masyarakat sipil melalui kebijakan represif dan sentralisasi kekuasaan. Gerakan mahasiswa dan media massa mengalami pelemahan struktural yang berlangsung panjang, sementara pembangunan ekonomi tetap dijalankan dengan penyesuaian simbolik tanpa perubahan mendasar. Dengan demikian, Peristiwa Malari tidak hanya menjadi episode kerusuhan sosial, tetapi juga penanda penting menguatnya karakter otoritarian Orde Baru dan penyempitan ruang demokrasi dalam kehidupan politik Indonesia



BAB 4

ARSITEKTUR PEMBANGUNAN ORDE BARU: ANALISIS STRATEGIS REPELITA I-VI DALAM TRANSFORMASI EKONOMI INDONESIA

*Sarah Febriyani Nur Ahyar, Fitria Agustin, Fikri Faisal Aditya,
Kendaya Widana, dan Habib Badrussalam*

Pembangunan nasional Indonesia pada era Orde Baru dilaksanakan melalui mekanisme perencanaan terpusat dengan menjadikan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) sebagai instrumen kebijakan utama. Pelaksanaan REPELITA dari tahap I hingga VI dalam rentang waktu 1969–1998 berperan penting dalam membentuk arah pembangunan nasional Indonesia pada periode modern. Sebagaimana dijelaskan oleh Mayrudin (2018) dalam *Journal of Government*, REPELITA merupakan bentuk operasionalisasi dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menetapkan kerangka kebijakan pembangunan di bidang ekonomi, sosial, dan politik guna mendorong stabilitas serta proses modernisasi setelah masa transisi pemerintahan. Setiap tahap REPELITA dirancang dengan fokus pembangunan yang berbeda-beda, menyesuaikan dengan dinamika ekonomi dan tantangan nasional yang dihadapi pada masing-masing periode pelaksanaannya.

REPELITA I (1969–1974) diarahkan pada upaya pemulihan kondisi perekonomian nasional serta pembangunan sarana prasarana dasar, terutama di bidang transportasi dan sistem irigasi. Selanjutnya, pada REPELITA II dan III yang berlangsung antara tahun 1974–1984, arah kebijakan pembangunan mulai



difokuskan pada penguatan sektor industri dan pencapaian swasembada pangan. Suarta dan Swastika (2000) dalam SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian menjelaskan bahwa dalam periode tersebut pemerintah mengoptimalkan peran sektor pertanian melalui berbagai strategi, seperti intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, serta pelaksanaan program BIMAS dan INMAS. Memasuki REPELITA IV hingga VI (1984–1998), kebijakan pembangunan menunjukkan pergeseran menuju diversifikasi struktur ekonomi, pengembangan industri yang berorientasi padat karya, serta pembangunan wilayah melalui program transmigrasi dan pengendalian laju urbanisasi. (Junarto et al., 2025).

Di samping berfungsi sebagai instrumen perencanaan pembangunan, REPELITA juga digunakan sebagai sarana untuk mendorong pemerataan pembangunan antardaerah melalui pelaksanaan program transmigrasi, pengembangan pusat-pusat industri di luar Pulau Jawa, serta peningkatan taraf hidup masyarakat perdesaan. Rustiadi dan Junaidi (2011) dalam Transmigrasi dan Pengembangan Wilayah mengemukakan bahwa kebijakan transmigrasi dirancang sebagai strategi spasial nasional yang bertujuan memperkuat keterkaitan ekonomi dan sosial antarwilayah. Pada tahap akhir pelaksanaan REPELITA VI, muncul pula berbagai program strategis yang mencerminkan peningkatan perhatian pemerintah terhadap dimensi kesejahteraan sosial dan kesehatan publik, salah satunya melalui inisiatif Gerakan Sayang Ibu sebagaimana dikaji oleh Aulia et al. (2022).

Meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional, pelaksanaan REPELITA juga menuai berbagai kritik, terutama karena karakter perencanaannya yang sangat terpusat dan cenderung mengabaikan konteks



sosial serta kearifan lokal di daerah. Khairani et al. (2022) menunjukkan bahwa pola pembangunan yang bersifat top-down berimplikasi pada munculnya ketimpangan antarwilayah serta meningkatnya ketergantungan daerah terhadap intervensi pemerintah pusat. Kendati demikian, tidak dapat disangkal bahwa REPELITA berperan penting dalam membawa Indonesia keluar dari keterpurukan ekonomi pada dekade 1960-an dan meletakkan dasar pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil hingga awal 1990-an (Hakim & Giovani, 2012). Oleh karena itu, REPELITA I–VI tidak semata-mata dapat dipahami sebagai rangkaian kebijakan ekonomi historis, melainkan juga sebagai warisan model perencanaan pembangunan jangka panjang yang memberikan pengaruh berkelanjutan terhadap praktik pembangunan nasional hingga masa kini.

Secara umum, perencanaan pembangunan melalui REPELITA merepresentasikan pendekatan pembangunan yang dirancang secara sistematis dengan menempatkan stabilitas politik, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan sosial sebagai landasan utama. Walaupun mekanisme REPELITA tidak lagi digunakan setelah masa Reformasi dan digantikan oleh Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), nilai-nilai fundamental dalam sistem perencanaan tersebut masih memengaruhi arah kebijakan pembangunan Indonesia hingga saat ini. Sulaeman et al. (2022) dalam *Historia: Jurnal Pendidik dan Sejarah* menegaskan bahwa kajian terhadap REPELITA I–VI memiliki peran strategis dalam memahami kesinambungan serta perubahan paradigma pembangunan nasional yang berlangsung dari era Orde Baru menuju periode Reformasi.



Di samping perannya sebagai perangkat perencanaan ekonomi, REPELITA juga digunakan sebagai sarana konsolidasi politik dalam pembangunan nasional. Setiap tahap pelaksanaannya dirancang untuk menciptakan dan memelihara stabilitas sosial serta politik yang dipandang sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan ekonomi. Lestari (2016) dalam Jurnal Pendidikan Sejarah Indonesia menjelaskan bahwa REPELITA tidak hanya berfungsi sebagai dokumen teknokratis, melainkan turut dimanfaatkan sebagai instrumen politik oleh rezim Orde Baru guna memperkuat legitimasi pemerintahan melalui capaian pembangunan. Hal tersebut tercermin dari kuatnya wacana “pembangunan sebagai ideologi negara” yang secara konsisten disuarakan dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto serta termuat dalam dokumen-dokumen GBHN sepanjang dekade 1970-1990-an.

Perlu dicermati bahwa penyusunan REPELITA dilaksanakan melalui peran lembaga perencanaan negara yang bersifat teknokratis, yakni Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Lembaga ini memiliki tanggung jawab utama dalam merumuskan tujuan makroekonomi serta menetapkan indikator kinerja pembangunan nasional. Hadi (2020) dalam Jurnal Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan menjelaskan bahwa Bappenas menjalankan fungsi strategis dalam mengoperasionalkan arah kebijakan GBHN ke dalam berbagai program lintas sektor, termasuk bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan industri dasar. Pendekatan teknokratis tersebut membentuk citra pembangunan Orde Baru sebagai proses yang terencana dan sistematis, meskipun dalam implementasinya kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik serta praktik birokratis.



Pelaksanaan REPELITA juga mencerminkan dinamika relasi antara negara dan masyarakat dalam proses pembangunan. Pada periode REPELITA III dan IV, pemerintah mulai mengusung gagasan Pembangunan Berwawasan Kesejahteraan Rakyat yang secara normatif menempatkan masyarakat baik sebagai sasaran maupun pelaku pembangunan. Namun demikian, Hadiz (2010) dalam *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia* mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat tersebut cenderung bersifat simbolik, karena struktur pengambilan keputusan pembangunan tetap didominasi oleh negara melalui mekanisme yang sentralistik. Kondisi ini berkontribusi pada munculnya ketimpangan pembangunan antardaerah, khususnya antara Pulau Jawa dan wilayah di luar Jawa, yang kemudian mengemuka sebagai persoalan mendasar menjelang berakhirnya pelaksanaan REPELITA VI.

Keberhasilan pelaksanaan REPELITA juga sangat dipengaruhi oleh peran strategis sumber daya minyak bumi yang menjadi penyangga utama penerimaan negara pada dekade 1970-an hingga awal 1980-an. Namun, terjadinya kejatuhan harga minyak dunia pada tahun 1986 memberikan dampak signifikan terhadap keberlanjutan pelaksanaan REPELITA IV dan V, sehingga mendorong pemerintah melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan. Pada fase ini, pemerintah mulai menekankan pentingnya diversifikasi struktur ekonomi dan membuka ruang lebih luas bagi investasi melalui berbagai kebijakan deregulasi. Winarno (2019) dalam *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* menjelaskan bahwa langkah deregulasi tersebut menandai pergeseran bertahap menuju sistem ekonomi pasar yang lebih terbuka, meskipun tetap berada dalam kerangka pengendalian negara. Oleh karena itu, REPELITA dapat dipahami sebagai instrumen



pembangunan yang bersifat adaptif terhadap dinamika ekonomi global sekaligus mencerminkan pendekatan kebijakan pragmatis yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru.

Pada tahap akhir pelaksanaannya, REPELITA VI (1994–1998) menunjukkan meningkatnya perhatian pemerintah terhadap aspek manusia sebagai pusat pembangunan. Penekanan pada peningkatan mutu sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan peran perempuan mencerminkan perubahan arah kebijakan menuju paradigma pembangunan yang lebih inklusif. Nurhadi (2021) dalam Jurnal Ekonomi Pembangunan Nasional menjelaskan bahwa orientasi tersebut menandai pergeseran pembangunan Indonesia dari pendekatan yang semata-mata bertumpu pada pertumbuhan ekonomi menuju konsep pembangunan berkelanjutan. Akan tetapi, terjadinya krisis moneter tahun 1997 mengakhiri pelaksanaan REPELITA dan sekaligus menjadi titik awal perubahan mendasar dalam sistem perencanaan pembangunan nasional pada era Reformasi.

A. Konsep Dasar REPELITA Sebagai Instrumen Pembangunan Nasional

Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) pada era Orde Baru berperan sebagai perangkat sentral dalam sistem perencanaan pembangunan nasional Indonesia yang bertujuan mengarahkan perubahan ekonomi dan sosial secara terencana, terukur, dan berkelanjutan. Dalam kedudukannya sebagai rencana pembangunan jangka menengah, REPELITA berfungsi untuk mengoperasionalkan arah pembangunan jangka panjang negara sekaligus menjadi acuan utama dalam



perumusan kebijakan sektoral serta penentuan distribusi anggaran pembangunan nasional. (Nitisastro, 2010; Bappenas, 1999).

Secara teoritik, perumusan REPELITA didorong oleh pemahaman bahwa proses pembangunan nasional tidak dapat dijalankan secara terpisah dan bersifat jangka pendek, tetapi harus dirancang melalui suatu sistem perencanaan yang terpusat, terpadu, dan berjangka panjang. Situasi ekonomi Indonesia pada penghujung dekade 1960-an yang dicirikan oleh tingkat inflasi yang tinggi, ketidakseimbangan anggaran negara, serta rendahnya kapasitas produksi dalam negeri menjadi faktor utama yang mendorong pemerintah Orde Baru menerapkan pola perencanaan pembangunan terpusat sebagai langkah strategis untuk pemulihan dan stabilisasi ekonomi. (Booth, 1998; Rachman, 2018).

Dalam praktik pelaksanaannya, perencanaan dan koordinasi REPELITA berada di bawah kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai lembaga negara yang menjalankan fungsi teknokratis. Bappenas bertanggung jawab dalam merumuskan sasaran pembangunan nasional, menetapkan skala prioritas sektor, serta menyinergikan kebijakan pembangunan lintas bidang. Kedudukan strategis lembaga ini terletak pada perannya dalam memastikan bahwa setiap program pembangunan dilaksanakan secara konsisten dan bertahap sesuai dengan kerangka perencanaan pembangunan nasional yang telah ditetapkan. (Bappenas, 1999; Saragih, 2016).

Sebagai perangkat utama pembangunan nasional, REPELITA ditandai oleh pola perencanaan jangka menengah yang berkelanjutan, keterhubungan antarfase pembangunan, serta integrasi berbagai sektor pembangunan. Setiap tahap



REPELITA dirumuskan untuk meneruskan sekaligus memperkuat pencapaian pada periode sebelumnya, sehingga pembangunan berlangsung secara progresif dan bersifat akumulatif. Pola tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang menempatkan negara sebagai aktor sentral (*state-led development*), dengan pemerintah memegang peranan dominan dalam menentukan arah serta strategi pembangunan nasional. (Hill, 2000; Hidayat, 2017).

Di samping kedudukannya sebagai dokumen perencanaan ekonomi, REPELITA juga memiliki fungsi sebagai alat pengendali proses pembangunan nasional. Melalui kerangka REPELITA, pemerintah mengatur distribusi anggaran negara, menetapkan skala prioritas investasi publik, serta menyelaraskan pelaksanaan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam dinamika politik Orde Baru, model perencanaan pembangunan yang bersifat sentralistik tersebut dipandang sebagai instrumen strategis untuk mempertahankan stabilitas nasional sekaligus menciptakan iklim yang mendukung pertumbuhan ekonomi. (Suryani, 2017; Hutabarat, 2018).

Secara filosofis, pelaksanaan REPELITA berangkat dari paradigma pembangunan yang menempatkan stabilitas nasional sebagai faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada masa Orde Baru, pemerintah meyakini bahwa kondisi politik dan keamanan yang stabil merupakan prasyarat penting bagi keberhasilan pembangunan, karena mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan produksi dan proses industrialisasi. Gagasan tersebut kemudian dilembagakan secara sistematis melalui rumusan Trilogi Pembangunan yang sejak REPELITA II dijadikan sebagai dasar utama dalam perumusan dan



pelaksanaan kebijakan pembangunan nasional. (Widodo, 2017); Santoso, 2018).

Di samping fungsi ekonominya, REPELITA juga memuat dimensi ideologis, di mana pembangunan dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperkuat legitimasi kekuasaan negara. Capaian pembangunan yang ditunjukkan melalui indikator pertumbuhan ekonomi, perluasan infrastruktur, serta peningkatan produksi pangan kerap ditampilkan sebagai representasi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa REPELITA tidak semata-mata berperan sebagai perangkat kebijakan ekonomi, melainkan juga menjadi instrumen konsolidasi politik pada masa pemerintahan Orde Baru. (Booth, 1998; Kusuma, 2015).

Secara komprehensif, konsep dasar REPELITA sebagai perangkat pembangunan nasional menunjukkan corak pembangunan terencana yang menempatkan negara sebagai aktor sentral dalam keseluruhan proses pembangunan. Melalui mekanisme perencanaan jangka menengah yang disusun secara sistematis dan berkelanjutan, REPELITA memberikan kontribusi signifikan dalam menentukan arah pembangunan Indonesia selama lebih dari tiga dekade. Kendati mampu membangun fondasi awal di sektor pertanian, infrastruktur, dan industrialisasi, pola pembangunan yang sangat terpusat juga melahirkan berbagai keterbatasan, khususnya terkait pemerataan pembangunan dan rendahnya pelibatan masyarakat dalam proses pembangunan. (Hill, 2000; Rahardjo, 2016).



B. Pola Kontinuitas dan Perubahan Strategi Pembangunan

Strategi pembangunan di Indonesia memperlihatkan adanya kesinambungan sekaligus perubahan yang berlangsung secara bertahap, seiring dengan dinamika politik, ekonomi, dan sistem pemerintahan yang berkembang dari waktu ke waktu. Unsur kontinuitas terlihat dari tetap dipertahankannya tujuan utama pembangunan nasional, seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan stabilitas pembangunan jangka panjang. Sejak masa Orde Baru hingga era reformasi, negara masih memegang peran sentral dalam merumuskan arah pembangunan melalui berbagai instrumen perencanaan nasional, meskipun bentuk dan mekanismenya mengalami penyesuaian. (Reza Hariyadi, 2021).

Kesinambungan ini diperkuat dengan keberadaan dokumen perencanaan jangka panjang, seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), yang dirancang untuk menjaga arah pembangunan tetap konsisten meskipun terjadi pergantian pemerintahan (Reza Hariyadi, 2021).

Di sisi lain, perubahan strategi pembangunan tampak jelas terutama setelah era reformasi, ketika pendekatan pembangunan yang sebelumnya bersifat sentralistik mulai bergeser menuju model yang lebih desentralistik dan partisipatif. Perubahan ini ditandai dengan meningkatnya peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan pembangunan, sebagai respons terhadap kritik terhadap model pembangunan lama yang dinilai kurang adil dan minim partisipasi publik. Pascareformasi merupakan upaya korektif terhadap dominasi



negara dalam pembangunan, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan politik. Dengan demikian, strategi pembangunan Indonesia mencerminkan proses adaptasi, di mana paradigma lama tidak sepenuhnya ditinggalkan, tetapi dimodifikasi agar lebih sesuai dengan tuntutan demokrasi, pemerataan, dan keberlanjutan. Pola ini menunjukkan bahwa pembangunan merupakan proses dinamis yang berupaya menyeimbangkan kesinambungan tujuan nasional dengan kebutuhan untuk melakukan perubahan strategi sesuai dengan perkembangan konteks sosial dan politik. (Arifin, 2024).

C. Landasan Filosofis Pembangunan: Trilogi Pembangunan

Landasan pemikiran pembangunan nasional Indonesia pada masa Orde Baru dirumuskan melalui konsep yang dikenal sebagai Trilogi Pembangunan, yang menempatkan stabilitas nasional, pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan hasil pembangunan sebagai tiga prinsip utama yang saling berkaitan. Konsep ini berangkat dari asumsi bahwa keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh terciptanya kondisi politik dan keamanan yang terkendali. Stabilitas nasional dipandang sebagai fondasi penting dalam menciptakan kepastian hukum dan ketertiban sosial, sehingga negara mampu menyediakan iklim yang mendukung bagi berlangsungnya kegiatan ekonomi dan investasi secara berkelanjutan. Pembangunan tidak hanya dimaknai sebagai upaya peningkatan kesejahteraan material, tetapi juga sebagai sarana untuk mengelola perubahan sosial agar tetap berada dalam kendali negara. (Sulistiowati, 2013).



Pertumbuhan ekonomi kemudian ditempatkan sebagai fokus utama dalam pelaksanaan Trilogi Pembangunan dan dijadikan ukuran keberhasilan pembangunan nasional. Orientasi ini diwujudkan melalui kebijakan modernisasi dan industrialisasi yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi nasional serta pendapatan masyarakat. (Dalam Arief 1997) menjelaskan bahwa penekanan pada pertumbuhan mencerminkan paradigma pembangunanisme, di mana negara memainkan peran dominan dalam mengatur dan mengarahkan proses pembangunan demi mencapai kemajuan ekonomi secara cepat. Namun, pendekatan ini kerap menimbulkan dampak samping berupa ketimpangan sosial dan ekonomi, terutama ketika peningkatan produksi tidak disertai dengan distribusi manfaat pembangunan yang merata. (Sulistiowati, 2013)

Sementara itu, pemerataan hasil pembangunan secara normatif dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Pemerataan dipahami sebagai upaya mengurangi kesenjangan antarwilayah dan antarkelompok masyarakat melalui kebijakan distribusi sumber daya serta perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi. Meskipun demikian, sejumlah kajian menunjukkan bahwa dalam praktiknya, aspek pemerataan sering kali kurang mendapat perhatian dibandingkan stabilitas dan pertumbuhan, sehingga ketimpangan struktural tetap menjadi persoalan yang melekat dalam pembangunan nasional.

Trilogi Pembangunan dapat dipahami sebagai paradigma pembangunan yang bersifat instrumental dan berorientasi pada peran kuat negara, di mana pertumbuhan ekonomi dijadikan sarana untuk mencapai stabilitas dan kesejahteraan



nasional. Walaupun konsep ini berhasil mendorong percepatan pembangunan ekonomi dan infrastruktur, berbagai kritik akademik menilai bahwa Trilogi Pembangunan kurang mengakomodasi partisipasi masyarakat serta cenderung mengabaikan aspek pemerataan dan keberlanjutan. Oleh karena itu, Trilogi Pembangunan tidak hanya relevan sebagai landasan filosofis pembangunan Indonesia pada masa lalu, tetapi juga penting dijadikan bahan refleksi kritis dalam merumuskan strategi pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan pada masa kini.

D. REPELITA I (1969-1974): Fondasi Stabilitas dan Pertanian

REPELITA I menjadi fase awal implementasi Rencana Pembangunan Lima Tahun yang dilaksanakan pada masa pemerintahan Orde Baru sebagai upaya mengatasi kondisi ekonomi nasional yang berada dalam situasi krisis pada penghujung 1960-an. Periode ini dicirikan oleh tingkat inflasi yang sangat tinggi, lemahnya stabilitas fiskal, serta rendahnya kapasitas produksi nasional sebagai dampak dari ketidakstabilan politik dan ekonomi pada periode sebelumnya. Atas dasar tersebut, fokus utama REPELITA I diarahkan pada pencapaian stabilitas makroekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sebagai fondasi bagi keberlanjutan pembangunan nasional. (Nitisastro, 2010; Booth, 1998).

Dalam kerangka konseptualnya, REPELITA I menetapkan sektor pertanian sebagai fokus utama agenda pembangunan. Penetapan prioritas ini berangkat dari kondisi struktur perekonomian Indonesia yang masih sangat bergantung pada



sektor agraris, sekaligus tingginya kebutuhan masyarakat terhadap komoditas pangan pokok, terutama beras. Upaya pembaruan di bidang pertanian dipandang sebagai langkah strategis untuk mengendalikan inflasi pangan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta menjaga stabilitas sosial dan politik di wilayah pedesaan. (Suharto, 2017; Hutabarat, 2018).

Kebijakan utama dalam pelaksanaan REPELITA I direalisasikan melalui penerapan strategi Revolusi Hijau yang dijalankan secara luas melalui program BIMAS (Bimbingan Massal) dan INMAS (Intensifikasi Massal). Program-program tersebut meliputi pemanfaatan benih unggul, distribusi pupuk bersubsidi, penyediaan fasilitas kredit bagi petani, layanan penyuluhan teknis, serta pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur irigasi. Strategi intensifikasi ini terbukti mampu mendorong peningkatan produktivitas padi secara signifikan sekaligus menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan pangan. (Suharto, 2017; Rahman, 2017).

Selain sektor pertanian, pelaksanaan REPELITA I juga diarahkan pada pengembangan infrastruktur dasar sebagai prasyarat pendukung kegiatan ekonomi nasional. Pemerintah memberikan perhatian utama pada perbaikan dan pembangunan jaringan jalan, pelabuhan, sistem irigasi, serta berbagai fasilitas transportasi dan distribusi. Keberadaan infrastruktur tersebut berperan penting dalam memperlancar arus hasil produksi pertanian, menekan biaya logistik, dan memperkuat keterhubungan antara wilayah pedesaan dengan pusat-pusat kegiatan ekonomi. (Hutabarat, 2018; Saragih, 2016).

Untuk mewujudkan stabilitas ekonomi makro, pemerintah Orde Baru pada masa REPELITA I juga menempuh langkah-langkah kebijakan fiskal yang ketat serta strategi pengendalian



laju inflasi. Penataan ulang anggaran negara dilakukan melalui upaya pengurangan defisit fiskal dan pembenahan sistem keuangan nasional. Pada tahap awal pembangunan ini, pendanaan program pemerintah masih sangat bergantung pada dukungan bantuan serta pinjaman luar negeri, terutama yang disalurkan melalui konsorsium Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI), yang berperan signifikan dalam menopang pembiayaan pembangunan nasional. (Saragih, 2016; Rachman, 2018).

Pelaksanaan REPELITA I menghasilkan berbagai pencapaian yang berperan penting dalam memulihkan kondisi perekonomian nasional. Tingkat inflasi berhasil dikendalikan secara signifikan, produksi bahan pangan mengalami peningkatan, serta pembangunan infrastruktur dasar mulai menunjukkan perkembangan yang lebih merata. Keberhasilan tersebut menjadi landasan awal bagi kelanjutan tahapan pembangunan berikutnya, terutama dalam mendorong pengembangan sektor industri dan upaya pemerataan pembangunan antardaerah. (Hill, 2000; Bappenas, 1999).

Namun demikian, pelaksanaan REPELITA I tidak terlepas dari berbagai keterbatasan. Pola pembangunan yang sangat terpusat dengan pendekatan top-down berimplikasi pada minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengambilan kebijakan. Selain itu, hasil-hasil pembangunan belum sepenuhnya terdistribusi secara merata, khususnya bagi wilayah di luar Pulau Jawa. Meskipun demikian, dari sudut pandang historis, REPELITA I tetap dinilai sebagai fase krusial yang berhasil meletakkan fondasi stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, serta arah dasar pembangunan nasional Indonesia pada era Orde Baru. (Booth, 1998; Hill, 2000).



E. REPELITA II (1974-1979): Konsolidasi dan Pemerataan Wilayah

REPELITA II merupakan tahap lanjutan dari pembangunan nasional Indonesia pada masa Orde Baru yang bertujuan mengonsolidasikan capaian stabilitas ekonomi dan peningkatan produksi pangan yang telah dirintis pada REPELITA I. Pada periode ini, pemerintah mulai mengalihkan fokus pembangunan dari sekadar pemulihan ekonomi menuju pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara lebih luas serta pemerataan hasil pembangunan antardaerah. Perubahan orientasi tersebut dipengaruhi oleh membaiknya kondisi ekonomi nasional dan meningkatnya kapasitas fiskal negara, terutama sebagai dampak dari kenaikan harga minyak dunia pada awal dekade 1970-an (Booth, 1998; Wibowo, 2015).

Secara konseptual, REPELITA II dirancang untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui konsolidasi sektor pertanian sekaligus mengembangkan industri dasar yang mendukung kegiatan produksi. Pemerintah menyadari bahwa keberhasilan stabilisasi ekonomi tidak akan berkelanjutan tanpa upaya pemerataan pembangunan, terutama antara wilayah Jawa dan luar Jawa. Oleh karena itu, pemerataan wilayah mulai ditempatkan sebagai salah satu tujuan strategis pembangunan nasional pada periode ini (Santoso, 2018; Hidayat, 2017).

Salah satu ciri utama REPELITA II adalah pemanfaatan surplus penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan layanan dasar. Dana tersebut digunakan untuk memperluas pembangunan jalan, irigasi, fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta proyek-proyek publik lain yang bertujuan meningkatkan



kesejahteraan masyarakat. Peningkatan belanja pembangunan ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan sosial dan regional (Booth, 1998; Wibowo, 2015).

Program strategis yang menonjol pada masa REPELITA II adalah pelaksanaan program transmigrasi secara lebih terencana dan berskala besar. Program ini bertujuan memindahkan penduduk dari daerah berpenduduk padat, khususnya Pulau Jawa, ke wilayah luar Jawa yang relatif masih jarang penduduk namun memiliki potensi sumber daya alam yang besar. Transmigrasi tidak hanya dipandang sebagai kebijakan kependudukan, tetapi juga sebagai instrumen pemerataan pembangunan wilayah, pembukaan lahan pertanian baru, serta penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru (Santoso, 2018; Saragih, 2016).

Selain transmigrasi, pemerintah juga mulai mengembangkan industri dasar dan industri pengolahan yang berbasis sumber daya domestik, seperti industri pupuk, semen, dan tekstil. Pengembangan industri ini berfungsi ganda, yakni mendukung sektor pertanian dengan menyediakan sarana produksi serta mengurangi ketergantungan terhadap impor barang-barang kebutuhan industri. Kebijakan ini mencerminkan upaya awal pemerintah dalam membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri dan terdiversifikasi (Hidayat, 2017; Hill, 2000).

Dalam konteks pemerataan sosial, REPELITA II juga memperluas penyediaan layanan pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan sekolah, puskesmas, serta peningkatan akses terhadap layanan publik menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat stabilitas sosial. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah



mulai melihat pembangunan manusia sebagai unsur penting dalam keberhasilan pembangunan nasional (Hutabarat, 2018).

Meskipun REPELITA II mencatat berbagai kemajuan, pelaksanaannya juga menghadapi sejumlah tantangan. Ketergantungan yang tinggi terhadap pendapatan migas menjadikan struktur pembiayaan pembangunan rentan terhadap fluktuasi harga minyak dunia. Selain itu, meskipun program pemerataan wilayah digalakkan, kesenjangan antarwilayah masih tetap terjadi, terutama dalam hal distribusi investasi dan akses terhadap sumber daya pembangunan. Pendekatan pembangunan yang masih sangat terpusat juga membatasi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan (Booth, 1998; Hill, 2000).

Secara keseluruhan, REPELITA II berperan penting dalam mengonsolidasikan fondasi pembangunan nasional yang telah dibangun pada periode sebelumnya serta memperluas orientasi pembangunan menuju pemerataan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Tahap ini menjadi jembatan penting antara fase stabilisasi ekonomi dan tahapan industrialisasi yang lebih luas pada periode REPELITA berikutnya, sekaligus menandai meningkatnya peran negara dalam mengelola pertumbuhan dan distribusi pembangunan nasional (Santoso, 2018; Bappenas, 1999).

F. REPELITA III (1979-1984): Pertumbuhan, Pemerataan, dan Ekspor

REPELITA III menandai fase penting dalam dinamika pembangunan nasional Indonesia, di mana pemerintah Orde



Baru mulai mengintegrasikan tujuan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan upaya pemerataan hasil pembangunan serta penguatan peran ekspor nonmigas. Periode ini berlangsung dalam konteks perubahan ekonomi global yang signifikan, terutama fluktuasi harga minyak dunia pada akhir 1970-an, yang mendorong pemerintah untuk mulai mengurangi ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi sebagai sumber utama penerimaan negara (Booth, 1998; Hill, 2000).

Secara konseptual, REPELITA III dilandaskan pada Trilogi Pembangunan yang menekankan tiga sasaran utama, yaitu stabilitas nasional yang mantap, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan pembangunan beserta hasilnya. Pada tahap ini, pemerintah berupaya menyeimbangkan antara pencapaian pertumbuhan ekonomi dan distribusi manfaat pembangunan agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial yang tajam. Dengan demikian, pembangunan tidak lagi dipandang semata-mata sebagai proses peningkatan produksi, tetapi juga sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih adil (Widodo, 2017; Rahardjo, 2016).

Salah satu arah kebijakan utama REPELITA III adalah penguatan sektor industri dan peningkatan ekspor, khususnya ekspor nonmigas. Pemerintah mulai mendorong industrialisasi berbasis substitusi impor menuju industrialisasi yang berorientasi ekspor melalui pengembangan industri pengolahan, seperti tekstil, kayu lapis, dan produk manufaktur ringan. Kebijakan ini bertujuan memperluas basis ekonomi nasional, meningkatkan devisa negara, serta menciptakan lapangan kerja baru di sektor nonpertanian (Hill, 2000; Hidayat, 2017).



Di sektor pertanian, REPELITA III melanjutkan program intensifikasi yang telah berjalan pada periode sebelumnya dengan penekanan pada peningkatan produktivitas dan diversifikasi komoditas. Upaya ini diarahkan untuk mempertahankan swasembada pangan sekaligus meningkatkan pendapatan petani. Pertanian tetap dipandang sebagai sektor strategis, tidak hanya sebagai penyedia pangan nasional, tetapi juga sebagai basis sosial ekonomi mayoritas penduduk Indonesia pada saat itu (Booth, 1998; Hutabarat, 2018).

Dalam rangka memperkuat pemerataan pembangunan, pemerintah memperluas pelaksanaan program Instruksi Presiden (Inpres) yang mencakup pembangunan desa, sekolah dasar, fasilitas kesehatan, dan infrastruktur lokal. Program-program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar dan memperkecil kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Melalui kebijakan ini, negara memainkan peran aktif dalam menjamin distribusi manfaat pembangunan hingga ke tingkat akar rumput (Suryani, 2017; Saragih, 2016).

Kebijakan fiskal dan moneter pada masa REPELITA III juga diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro di tengah tekanan eksternal akibat perlambatan ekonomi global. Pemerintah mulai melakukan efisiensi belanja pembangunan dan mendorong peran sektor swasta dalam kegiatan ekonomi. Langkah ini mencerminkan adanya penyesuaian strategi pembangunan dari pendekatan yang sangat bergantung pada belanja negara menuju pemanfaatan mekanisme pasar secara lebih luas (Hill, 2000; Rachman, 2018).

Meskipun REPELITA III mencatat keberhasilan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas ekspor



nonmigas, tantangan pembangunan tetap muncul dalam bentuk ketimpangan pendapatan dan ketergantungan terhadap komoditas tertentu. Selain itu, industrialisasi yang berkembang pesat belum sepenuhnya disertai dengan penguatan basis teknologi dan sumber daya manusia, sehingga daya saing industri nasional masih relatif terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada periode ini masih menghadapi keterbatasan struktural (Booth, 1998; Rahardjo, 2016).

Secara keseluruhan, REPELITA III merepresentasikan fase transisi penting dalam strategi pembangunan nasional Indonesia. Dengan menempatkan pertumbuhan, pemerataan, dan ekspor sebagai pilar utama, pemerintah berupaya membangun struktur ekonomi yang lebih seimbang dan adaptif terhadap perubahan global. Meskipun belum sepenuhnya berhasil mengatasi ketimpangan dan ketergantungan struktural, REPELITA III tetap memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat fondasi industrialisasi dan integrasi Indonesia ke dalam perekonomian internasional (Hill, 2000; Widodo, 2017).

G. REPELITA IV (1984-1989): Industrialisasi Mandiri dan Pengembangan SDM

REPELITA IV merupakan tahap penting dalam perjalanan pembangunan nasional Indonesia yang ditandai oleh semakin kuatnya orientasi pada industrialisasi mandiri dan pengembangan kualitas sumber daya manusia. Periode ini berlangsung dalam konteks menurunnya harga minyak dunia pada pertengahan dekade 1980-an yang secara signifikan memengaruhi penerimaan negara. Kondisi tersebut



mendorong pemerintah Orde Baru untuk melakukan reorientasi strategi pembangunan dengan mengurangi ketergantungan terhadap sektor migas dan memperkuat basis industri nasional yang lebih beragam dan berdaya saing (Booth, 1998; Hill, 2000).

Secara konseptual, REPELITA IV tetap berpijak pada Trilogi Pembangunan, namun dengan penekanan yang lebih besar pada upaya mencapai kemandirian ekonomi melalui industrialisasi. Pemerintah memandang bahwa keberlanjutan pertumbuhan ekonomi hanya dapat dicapai apabila struktur ekonomi nasional mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan tidak terlalu bergantung pada komoditas primer. Oleh karena itu, pengembangan industri pengolahan, khususnya industri menengah dan manufaktur, menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan periode ini (Widodo, 2017; Hidayat, 2017).

Salah satu capaian strategis yang menonjol pada masa REPELITA IV adalah keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Keberhasilan ini tidak hanya memiliki makna ekonomi, tetapi juga simbolik, karena menunjukkan kemampuan negara dalam memenuhi kebutuhan pangan nasional secara mandiri. Swasembada beras menjadi fondasi penting bagi pengalihan fokus pembangunan dari sektor pertanian menuju industrialisasi tanpa mengabaikan stabilitas sosial dan ketahanan pangan (Booth, 1998; Hutabarat, 2018).

Dalam rangka mendorong industrialisasi mandiri, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan deregulasi dan debirokratisasi di sektor industri dan perdagangan. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi, menarik investasi swasta, serta memperluas kapasitas ekspor



manufaktur. Pada periode ini, industri tekstil, alas kaki, elektronik, dan otomotif mulai berkembang pesat, meskipun masih sangat bergantung pada teknologi dan bahan baku impor (Hill, 2000; Hidayat, 2017).

Pengembangan sumber daya manusia menjadi elemen kunci dalam pelaksanaan REPELITA IV. Pemerintah menyadari bahwa industrialisasi tidak dapat berjalan optimal tanpa tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan. Oleh karena itu, pembangunan sektor pendidikan dan pelatihan vokasional diperkuat melalui perluasan akses pendidikan dasar dan menengah, pembangunan sekolah kejuruan, serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Upaya ini diharapkan mampu mendukung kebutuhan industri nasional akan tenaga kerja yang kompeten (Rahardjo, 2016; Widodo, 2017).

Selain pendidikan formal, pemerintah juga mulai memperhatikan pengembangan kapasitas manajerial dan teknologi melalui kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga internasional. Transfer teknologi dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola industri dipandang sebagai bagian penting dari strategi industrialisasi mandiri. Meskipun demikian, keterbatasan dalam riset dan pengembangan nasional masih menjadi tantangan utama dalam menciptakan inovasi teknologi yang berkelanjutan (Hill, 2000; Rahardjo, 2016).

Di sisi lain, REPELITA IV juga menghadapi berbagai kendala struktural. Ketimpangan pembangunan antardaerah masih relatif tinggi, dan industrialisasi cenderung terkonsentrasi di wilayah tertentu, khususnya Pulau Jawa. Selain itu, ketergantungan terhadap modal asing dan impor teknologi membatasi tingkat kemandirian industri nasional. Kondisi ini menunjukkan bahwa industrialisasi mandiri yang diupayakan



pada periode ini masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam struktur ekonomi nasional (Booth, 1998; Widodo, 2017).

Secara keseluruhan, REPELITA IV menegaskan pergeseran strategi pembangunan nasional Indonesia menuju industrialisasi yang lebih mandiri dan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, tahap ini memberikan kontribusi penting dalam memperkuat fondasi industri nasional dan menyiapkan sumber daya manusia sebagai modal utama pembangunan pada periode REPELITA selanjutnya. Dengan demikian, REPELITA IV dapat dipandang sebagai fase konsolidasi menuju ekonomi yang lebih modern dan berbasis industri (Hill, 2000; Bappenas, 1999).

H. REPELITA V (1989-1994): Konsolidasi dan Daya Saing Nasional

REPELITA V merupakan tahap lanjutan pembangunan nasional yang diarahkan pada upaya konsolidasi hasil-hasil pembangunan sebelumnya sekaligus peningkatan daya saing ekonomi nasional di tengah semakin menguatnya arus globalisasi. Periode ini ditandai oleh integrasi ekonomi dunia yang makin intensif serta kompetisi antarnegara yang semakin ketat, sehingga menuntut Indonesia untuk memiliki struktur ekonomi yang efisien, produktif, dan mampu bersaing di pasar internasional. Oleh karena itu, pemerintah Orde Baru mulai menempatkan isu daya saing nasional sebagai salah satu fokus utama kebijakan pembangunan (Hill, 2000; Booth, 1998).



Secara konseptual, REPELITA V masih berlandaskan pada Trilogi Pembangunan, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada peningkatan efisiensi dan produktivitas ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang dicapai pada periode sebelumnya dipandang perlu dikonsolidasikan agar lebih berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan tidak lagi hanya berorientasi pada perluasan kapasitas produksi, tetapi juga pada peningkatan nilai tambah, penguatan struktur industri, serta penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi investasi (Widodo, 2017; Bappenas, 1999).

Salah satu arah kebijakan strategis REPELITA V adalah penguatan industri nasional agar mampu bersaing di pasar global. Pemerintah mendorong pengembangan industri manufaktur yang memiliki orientasi ekspor serta mempercepat diversifikasi produk ekspor nonmigas. Deregulasi di bidang industri, perdagangan, dan keuangan terus dilanjutkan untuk mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi. Kebijakan ini memperlihatkan semakin besarnya peran mekanisme pasar dalam proses pembangunan nasional, meskipun negara tetap berfungsi sebagai pengarah utama (Hill, 2000; Hidayat, 2017).

Dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, pemerintah juga menaruh perhatian besar pada pembangunan infrastruktur ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan jaringan transportasi, telekomunikasi, dan energi diperluas untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa serta menurunkan biaya produksi. Di bidang sumber daya manusia, peningkatan mutu pendidikan, pelatihan tenaga kerja, dan penguasaan teknologi dipandang sebagai prasyarat penting agar Indonesia mampu menghasilkan tenaga kerja yang produktif dan adaptif



terhadap perubahan ekonomi global (Rahardjo, 2016; Widodo, 2017).

Selain itu, REPELITA V juga ditandai oleh semakin berkembangnya sektor swasta sebagai motor pertumbuhan ekonomi. Pemerintah memberikan ruang yang lebih luas bagi dunia usaha nasional untuk berperan dalam kegiatan produksi, investasi, dan ekspor. Perkembangan sektor swasta ini berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, namun juga memunculkan tantangan baru berupa ketimpangan pendapatan dan konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu (Booth, 1998; Hill, 2000).

Meskipun mencatat berbagai kemajuan, pelaksanaan REPELITA V tetap menghadapi sejumlah keterbatasan struktural. Ketergantungan terhadap modal asing dan impor teknologi masih relatif tinggi, sehingga kemandirian industri nasional belum sepenuhnya terwujud. Di samping itu, meskipun daya saing ekonomi nasional mulai meningkat, manfaat pembangunan belum terdistribusi secara merata antardaerah dan lapisan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa konsolidasi pembangunan yang dilakukan pada periode ini belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah ketimpangan struktural (Booth, 1998; Rahardjo, 2016).

Secara keseluruhan, REPELITA V dapat dipandang sebagai fase konsolidasi pembangunan nasional yang berorientasi pada peningkatan daya saing ekonomi Indonesia. Melalui penguatan industri, deregulasi ekonomi, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerintah berupaya menyiapkan Indonesia agar mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, REPELITA V memberikan



kontribusi penting dalam membentuk fondasi ekonomi nasional yang lebih kompetitif menjelang pelaksanaan REPELITA VI dan memasuki dekade 1990-an (Hill, 2000; Bappenas, 1999).

I. REPELITA VI (1994-1999): Lepas Landas yang Terhenti

REPELITA VI merupakan tahap pembangunan nasional yang dirancang sebagai fase lepas landas menuju negara industri baru. Pada awal pelaksanaannya, kondisi ekonomi Indonesia menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, inflasi terkendali, dan ekspor nonmigas yang terus meningkat. Pemerintah Orde Baru menargetkan percepatan industrialisasi, peningkatan daya saing nasional, serta penguatan struktur ekonomi sebagai fondasi menuju pembangunan jangka panjang tahap berikutnya (Hill, 2000; Bappenas, 1999).

Secara konseptual, REPELITA VI berlandaskan pada kerangka Pembangunan Jangka Panjang Tahap II (PJPT II) yang menekankan transformasi struktural ekonomi dari basis agraris menuju ekonomi industri dan jasa. Dalam konteks ini, negara diarahkan untuk memasuki fase ekonomi yang lebih modern dan terintegrasi dengan pasar global. Kebijakan pembangunan tetap berpijak pada Trilogi Pembangunan, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada efisiensi, produktivitas, dan modernisasi ekonomi (Widodo, 2017; Rahardjo, 2016).

Fokus utama kebijakan REPELITA VI adalah percepatan industrialisasi dan penguatan sektor manufaktur berorientasi



ekspor. Pemerintah mendorong pengembangan industri berteknologi menengah hingga tinggi serta memperluas peran sektor swasta dalam kegiatan produksi dan investasi. Deregulasi dan liberalisasi ekonomi terus dilanjutkan guna menciptakan iklim usaha yang lebih kompetitif, sejalan dengan tuntutan globalisasi ekonomi pada dekade 1990-an (Hill, 2000; Booth, 1998).

Selain sektor industri, pembangunan infrastruktur dan pengembangan sumber daya manusia tetap menjadi prioritas strategis. Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan teknologi, dan efisiensi tenaga kerja dipandang sebagai prasyarat utama untuk mendukung transformasi ekonomi nasional. Pemerintah juga berupaya memperluas pembangunan infrastruktur transportasi, energi, dan telekomunikasi guna menopang aktivitas ekonomi berskala nasional dan internasional (Rahardjo, 2016; Widodo, 2017).

Namun, pelaksanaan REPELITA VI tidak berjalan sesuai dengan perencanaan awal akibat meletusnya krisis ekonomi Asia pada tahun 1997–1998. Krisis ini berdampak langsung pada stabilitas ekonomi nasional, ditandai dengan merosotnya nilai tukar rupiah, meningkatnya inflasi, serta runtuhnya sektor perbankan dan industri. Ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing dan lemahnya fundamental ekonomi nasional memperparah dampak krisis, sehingga banyak program pembangunan yang telah direncanakan terpaksa dihentikan atau mengalami penundaan signifikan (Booth, 1998; Kusuma, 2015).

Dampak krisis ekonomi tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga meluas ke ranah sosial dan politik. Meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan memicu ketidakpuasan sosial, yang pada akhirnya berujung pada krisis legitimasi



pemerintahan Orde Baru. Kondisi ini menyebabkan runtuhnya rezim pada tahun 1998 dan menandai berakhirnya sistem pembangunan yang berbasis perencanaan terpusat seperti REPELITA (Kusuma, 2015; Hill, 2000).

Dalam perspektif evaluatif, REPELITA VI menunjukkan keterbatasan pendekatan pembangunan yang terlalu bergantung pada pertumbuhan ekonomi tinggi dan arus modal internasional tanpa diimbangi oleh penguatan institusi ekonomi dan tata kelola yang baik. Krisis ekonomi membuktikan bahwa fondasi pembangunan nasional belum sepenuhnya kokoh untuk menghadapi guncangan eksternal. Dengan demikian, fase lepas landas yang diharapkan pada periode ini tidak dapat tercapai secara optimal (Booth, 1998; Rahardjo, 2016).

Secara keseluruhan, REPELITA VI dapat dipandang sebagai puncak sekaligus titik balik dalam sejarah pembangunan nasional Indonesia. Meskipun diawali dengan optimisme menuju negara industri maju, krisis ekonomi 1997–1998 menghentikan proses tersebut dan membuka babak baru pembangunan nasional pada era Reformasi. Oleh karena itu, REPELITA VI menjadi pelajaran penting mengenai pentingnya ketahanan ekonomi, pemerataan pembangunan, dan tata kelola yang transparan dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan (Hill, 2000; Widodo, 2017).

J. Rangkuman

Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA) merupakan instrumen perencanaan pembangunan nasional yang memiliki peran strategis dalam membentuk arah pembangunan



Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Melalui mekanisme perencanaan jangka menengah yang bersifat sistematis dan berkesinambungan, REPELITA menjadi kerangka utama dalam mengarahkan transformasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia selama kurun waktu 1969–1998. Setiap tahapan REPELITA dirancang untuk melanjutkan serta memperkuat capaian pembangunan sebelumnya, sehingga menghasilkan proses pembangunan yang bertahap dan kumulatif.

Pada tahap awal, pelaksanaan REPELITA I difokuskan pada pemulihan stabilitas ekonomi makro, pengendalian inflasi, serta pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya melalui penguatan sektor pertanian dan pembangunan infrastruktur dasar. Selanjutnya, REPELITA II dan III menunjukkan pergeseran menuju konsolidasi pembangunan dengan menekankan industrialisasi dan pencapaian swasembada pangan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi nasional. Periode REPELITA IV dan V mencerminkan upaya diversifikasi struktur ekonomi, peningkatan daya saing industri nasional, serta perluasan pembangunan wilayah di luar Pulau Jawa. Sementara itu, REPELITA VI diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan kelompok rentan sebagai respons terhadap dinamika global dan tuntutan pembangunan yang lebih inklusif.

Selain berfungsi sebagai instrumen perencanaan ekonomi, REPELITA juga memiliki dimensi politik yang kuat. Pembangunan dijadikan sebagai sarana konsolidasi kekuasaan dan legitimasi pemerintahan Orde Baru dengan menempatkan stabilitas politik dan keamanan sebagai prasyarat utama keberhasilan pembangunan. Pola pembangunan yang bersifat



sentralistik dan berorientasi negara memungkinkan pemerintah mengendalikan arah pembangunan secara efektif, tetapi sekaligus membatasi partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah dalam proses pengambilan keputusan.

Meskipun REPELITA berhasil meletakkan fondasi penting bagi pembangunan nasional, terutama dalam hal stabilitas ekonomi, ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, dan industrialisasi awal, pendekatan pembangunan yang terlalu terpusat juga menimbulkan berbagai keterbatasan. Ketimpangan antarwilayah, rendahnya partisipasi masyarakat, serta ketergantungan terhadap sumber pendanaan eksternal menjadi tantangan struktural yang muncul selama pelaksanaan REPELITA. Keterbatasan tersebut semakin terlihat menjelang akhir REPELITA VI, terutama ketika krisis moneter 1997-1998 menghentikan proses pembangunan yang telah dirancang dan sekaligus menandai berakhirnya era REPELITA.

REPELITA I-VI tidak hanya dapat dipahami sebagai rangkaian kebijakan pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru, tetapi juga sebagai warisan sistem perencanaan pembangunan nasional yang memberikan pengaruh jangka panjang terhadap arah kebijakan pembangunan Indonesia hingga masa Reformasi. Pemahaman kritis terhadap pengalaman pelaksanaan REPELITA menjadi penting sebagai bahan refleksi dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan di masa mendatang, tanpa mengabaikan pelajaran historis yang telah membentuk dinamika pembangunan nasional Indonesia.



BAB 5

KRISIS DAN PERUBAHAN: ANALISIS MULTIDIMENSIONAL TERHADAP RUNTUHNYA ORDE BARU DAN LAHIRNYA ERA REFORMASI

Aditya, Reni Fitriani, Iis Aisah, dan Yuyus

Peristiwa Reformasi 1998 merupakan momentum krusial dalam perjalanan sejarah politik Indonesia. Reformasi lahir sebagai respons terhadap krisis multidimensi yang melanda bangsa pada penghujung pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Selama lebih dari tiga dekade, rezim Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang relatif pesat. Namun, keberhasilan tersebut menyimpan berbagai persoalan mendasar, terutama penyimpangan kekuasaan yang tercermin dalam praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), pembatasan kebebasan sipil, serta dominasi militer dalam struktur dan proses politik.

Krisis ekonomi Asia tahun 1997 semakin memperburuk kondisi nasional yang telah rapuh secara struktural. Nilai tukar rupiah mengalami depresiasi tajam, harga kebutuhan pokok meningkat secara signifikan, dan tingkat pengangguran melonjak. Krisis ini memicu meluasnya ketidakpuasan sosial dan memperlihatkan ketidakmampuan negara dalam melindungi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi tampil sebagai aktor utama yang mengartikulasikan tuntutan



perubahan, khususnya pengunduran diri Presiden Soeharto dan reformasi menyeluruh terhadap sistem pemerintahan.

Gelombang demonstrasi masif yang mencapai puncaknya pada Mei 1998, disertai kerusuhan sosial di sejumlah wilayah, akhirnya mendorong Presiden Soeharto untuk mengundurkan diri pada 21 Mei 1998. Peristiwa ini menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan menjadi titik awal transisi politik menuju Era Reformasi, yang kerap dimaknai sebagai kelahiran “Indonesia Baru” dengan orientasi politik yang lebih demokratis.

Memasuki Era Reformasi, agenda perubahan diarahkan pada upaya demokratisasi dan restrukturisasi kekuasaan negara. Sejumlah kebijakan fundamental dilakukan, antara lain amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih terbuka dan kompetitif, penguatan lembaga-lembaga negara, serta komitmen terhadap pemberantasan KKN. Kendati demikian, proses transformasi tersebut tidak berjalan tanpa hambatan, mengingat masih kuatnya persoalan penegakan hukum, konflik sosial, dan ketimpangan ekonomi.

Secara struktural, Reformasi 1998 tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sistem politik Orde Baru yang sangat tersentralisasi. Konsentrasi kekuasaan pada lembaga kepresidenan, lemahnya independensi lembaga legislatif dan yudikatif, serta tidak berfungsinya mekanisme checks and balances menciptakan ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, Reformasi dapat dipahami sebagai upaya korektif terhadap sistem politik yang selama bertahun-tahun berjalan tanpa pengawasan yang memadai.



Lebih jauh, dinamika Reformasi 1998 juga melibatkan berbagai aktor di luar kalangan mahasiswa. Organisasi masyarakat sipil, lembaga swadaya masyarakat, pers, tokoh agama, intelektual, serta sebagian elite politik dan militer turut berperan dalam mendorong perubahan. Keterlibatan beragam elemen tersebut menunjukkan bahwa Reformasi merupakan gerakan kolektif yang lahir dari kesadaran bersama akan urgensi pembaruan tata kelola negara.

Dampak awal Reformasi terlihat jelas dalam perubahan lanskap politik dan sosial Indonesia. Kebebasan pers mengalami perluasan, sistem multipartai berkembang, dan partisipasi politik masyarakat meningkat secara signifikan. Namun, euforia demokrasi pada fase awal Reformasi juga memunculkan tantangan baru, seperti instabilitas politik dan lemahnya konsolidasi kelembagaan, yang menuntut penyesuaian berkelanjutan dalam praktik demokrasi.

Dengan demikian, Reformasi 1998 memiliki relevansi yang terus berlanjut dalam konteks Indonesia kontemporer. Kajian terhadap peristiwa ini tidak hanya penting sebagai rekonstruksi sejarah, tetapi juga sebagai refleksi kritis terhadap capaian dan keterbatasan demokratisasi di Indonesia. Pemahaman yang komprehensif mengenai Reformasi diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, dan keadilan sosial, serta mencegah terulangnya praktik kekuasaan yang otoriter di masa mendatang.



A. Akar dan Penyebab Terjadinya Reformasi 1998

Reformasi 1998 tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan akumulasi dari berbagai tekanan struktural dan krisis multidimensi yang menimpa Indonesia di bawah rezim Orde Baru. Faktor-faktor ekonomi, kelemahan politik, ketimpangan sosial, dan krisis legitimasi saling memperkuat, sehingga melahirkan momentum revolusioner yang tidak bisa lagi diabaikan.

1. Krisis Ekonomi Asia (1997–1998) dan Dampaknya pada Indonesia

Salah satu akar paling jelas dari Reformasi 1998 adalah krisis finansial Asia yang dimulai pada 1997. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling keras terpuuk. Menurut analisis ekonomi-politik, krisis ini menyebabkan kontraksi besar dalam ekonomi domestik: pertumbuhan ekonomi melemah, banyak perusahaan bangkrut, dan sistem perbankan nasional menghadapi kesulitan likuiditas serius (Datta et al., n.d.).



Gambar 1. Krisis Ekonomi Asia

(Sumber; <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200511230413-20-502279/12-mei-1998-krisis-ekonomi-politik-hingga-kejatuhan-rezim>)

Nilai rupiah ambles tajam, pengangguran meningkat drastis, dan inflasi melonjak, yang secara langsung memperburuk kesejahteraan masyarakat. Dalam kondisi tersebut, banyak



rumah tangga kehilangan pendapatan, dan masyarakat menengah ke bawah menjadi sangat rentan terhadap guncangan ekonomi. Kehancuran sektor keuangan juga mengungkap hubungan erat antara bisnis dan politik Orde Baru: banyak konglomerat besar yang memiliki ikatan kuat dengan rezim Soeharto, sehingga krisis keuangan sekaligus menjadi krisis politik. Sebagai contoh, perusahaan-perusahaan milik kroni menghadapi beban utang besar, dan ketika modal keluar atau kredit macet, dampaknya tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga memperlemah struktur patronase politik yang telah lama menopang Orde Baru.

2. Kelemahan Struktur Politik Orde Baru: Sentralisasi Kekuasaan dan KKN

Orde Baru sangat bergantung pada struktur kekuasaan yang sangat tersentralisasi. Presiden Soeharto mendominasi lembaga eksekutif, birokrasi, militer, dan partai politik (Golkar), sehingga checks and balances relatif lemah. Kebijakan publik seringkali diambil secara top-down, dan elit kekuasaan tidak terbiasa mempertimbangkan kritik dari kelompok sipil yang lebih luas. Sentralisasi ini menjadi wadah subur bagi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), yang seakan menjadi bagian integral dari sistem pemerintahan Orde Baru (Hermansyah and Sauki 2025).

Fiona Robertson-Snape (1999) dalam artikelnya menyoroti bagaimana KKN bukan hanya fenomena akibat individu jahat, melainkan sistem politik-ekonomi yang telah terstruktur rapi selama rezim Soeharto. Dalam analisisnya, Robertson-Snape menulis bahwa praktik KKN berkembang dalam budaya patronase di mana loyalitas politik dihargai lebih tinggi daripada efisiensi birokrasi dan akuntabilitas public (Robertson-snape 2019).



Struktur ini melemahkan legitimasi institusi negara karena akses terhadap kekuasaan dan sumber daya sangat bergantung pada koneksi pribadi, bukan pada mekanisme meritokrasi atau transparansi. Akibatnya, banyak warga merasa bahwa negara tidak adil, dan tuntutan reformasi untuk menghentikan KKN menjadi salah satu tuntutan utama mahasiswa dan kelompok kritis di era 1998.

3. Ketimpangan Sosial dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Reformasi 1998 juga dipicu oleh ketidakpuasan sosial yang dalam. Meskipun Orde Baru sering dipuji karena stabilitas dan pembangunan ekonomi, distribusi manfaat pembangunan tidak merata. Banyak kelompok masyarakat, terutama dari kelas bawah dan etnis minoritas, merasakan bahwa kemajuan ekonomi tidak membawa keadilan sosial yang memadai. Sentimen ketidakadilan ini diperparah oleh persepsi bahwa rezim memberikan perlakuan khusus kepada kroni dan elit tertentu, sementara rakyat biasa tetap termarginalkan.

Ketika krisis ekonomi semakin mendalam, ketegangan sosial pun meningkat. Kulminasi dari ketegangan ini terlihat pada kerusuhan Mei 1998, terutama di Jakarta. Wahyu Iryana dan Muhamad Bisri Mustofa dalam analisis mereka menyebut bahwa kerusuhan tersebut bukan hanya reaksi spontan terhadap krisis ekonomi, tetapi juga luapan protes terhadap ketidakadilan sistemik: “demonstrasi menuntut kejatuhan rezim Orde Baru” yang dinilai melakukan korupsi, nepotisme, dan kekuasaan otoriter (Iryana and Mustofa 2023)

Selain itu, aspek HAM sangat menonjol dalam konflik 1998. Banyak laporan menyebut tindakan aparat keamanan terhadap mahasiswa (misalnya tragedi Trisakti), serta



pelanggaran hak-hak sipil dan etnis (termasuk minoritas Tionghoa) selama kerusuhan. Ketidakmampuan negara melindungi warganya dari kekerasan massal memperparah krisis legitimasi, karena warga merasa tidak hanya dirugikan ekonomi, tetapi juga secara politis dan kemanusiaan.

4. Melemahnya Legitimasi Pemerintahan Soeharto

Krisis ekonomi, praktik KKN, dan pelanggaran sosial-HAM secara kolektif melemahkan legitimasi pemerintah Soeharto. Kekuasaan yang sebelumnya tampak tak tergoyahkan mulai digoyahkan oleh gelombang protes mahasiswa, tekanan dari masyarakat sipil, dan ekspos dari media internasional. Selain itu, struktur kekuasaan yang terlalu terkonsentrasi di tangan satu orang dan lingkaran dekatnya (kriminalisasi elit) membuat rezim semakin rentan terhadap kritik dan keretakan internal.

Selain itu, dalam konteks internasional pasca-Cold War, tekanan dari lembaga keuangan global (seperti IMF) dan donor asing menambahkan beban pada legitimasi Soeharto. Pembiayaan bailout dan syarat reformasi ekonomi yang dilekatkan menuntut perubahan sistemik, bukan hanya kosmetik. Kondisi ini memperlemah argumen rezim bahwa dirinya adalah penjaga stabilitas dan kemajuan ekonomi.

Dengan kombinasi krisis ekonomi, delegitimasi politik, dan tekanan sosial, panggung Reformasi pun menjadi tak terelakkan. Ketika mahasiswa, elit politik, dan masyarakat umum bersatu dalam tuntutan perubahan, Soeharto kehilangan basis dukungan moral dan praktisnya. Legitimasi yang dulu dibangun lewat pertumbuhan ekonomi dan kontrol otoriter runtuh, membuka jalan bagi era baru demokrasi dan reformasi politik.



B. Dinamika Gerakan Reformasi

1. Demonstrasi 1998

Tahun 1998 menjadi puncak dari gerakan yang sebelumnya ada. Kelahiran gerakan mahasiswa tahun tersebut dipicu oleh krisis moneter yang diikuti dengan kekacauan ekonomi. Mahasiswa pada tahun 1998 mengekspresikan kepedulian mereka melalui diskusi dan aksi protes terhadap penderitaan rakyat akibat krisis ekonomi. Sebelum melaksanakan demonstrasi, mahasiswa berdialog dengan cendekiawan dan anggota militer terkait isu ekonomi dan politik yang dihadapi oleh negara pada tahun 1998. Di samping itu, perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia berusaha mengadakan pembicaraan dengan Presiden mengenai krisis ekonomi yang melanda negara, namun upaya mereka tidak mendapatkan tanggapan yang positif. Akibatnya, gerakan mahasiswa tersebut berkembang menjadi aksi nasional dengan fokus utama pada reformasi menyeluruh.

Krisis ekonomi yang berkepanjangan, bahkan menyebabkan kelaparan di daerah-daerah Indonesia, memicu lahirnya gerakan dari kalangan mahasiswa. Mereka merasa prihatin dan berinisiatif untuk melakukan aksi melawan pemerintah. Fokus perjuangan mahasiswa adalah pada isu KKN, yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yang ingin diatasi melalui reformasi di bidang ekonomi, politik, dan hukum, atau disebut juga reformasi secara menyeluruh. Dalam kondisi pemerintahan seperti itu, isu-isu populis muncul, yang kemudian dikenal dengan enam visi reformasi: mengadili Soeharto, mencabut Dwi Fungsi ABRI, menghapus KKN, menegakkan supremasi hukum, memberikan otonomi daerah, dan mengamandemen UUD 1945. Pada tahun 1998, banyak



kelompok muncul untuk melakukan demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mengundurkan diri. Gerakan mahasiswa Indonesia pada tahun itu merupakan puncak dari aksi mereka, yang berujung pada jatuhnya Orde Baru dan pengunduran Soeharto dari kursi kepresidenan pada 21 Mei 1998.

Berbagai kelompok aksi muncul di sejumlah wilayah untuk melawan rezim Suharto. Semua tim yang terlibat dalam perjuangan reformasi kali ini berbeda dibandingkan dengan tahun 1966, yang lebih terorganisir karena adanya lembaga yang mengaturnya. Akibatnya, masing-masing kelompok aksi tidak memiliki satu platform atau garis komando yang sama untuk menghentikan orde baru. Fokus gerakan mahasiswa saat itu adalah kepada pemimpin orde baru, yaitu Soeharto. Meskipun banyak kelompok mahasiswa di berbagai daerah, mereka bisa bersatu untuk menggulingkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Seperti yang diungkapkan oleh Selo Soemardjan bahwa: "Tindakan keras dari aparat yang menghalangi mahasiswa keluar kampus, menyebarkan intelijen ke dalam kampus, serta hilangnya beberapa aktivis membangkitkan kesadaran kolektif di antara mereka. Ini adalah sebuah kesadaran bersama dalam kelompok yang harus bersatu menghadapi penguasa."

Pada 12 Mei 1998, terjadi sebuah insiden tragis yang mengakibatkan kematian empat mahasiswa Trisakti, serta puluhan teman-teman mereka mengalami cedera berat. Situasi ini memicu kemarahan di kalangan mahasiswa terhadap pemerintah Orde Baru dan militer, yang dianggap bertanggung jawab atas kematian tersebut. Empat mahasiswa yang meninggal adalah Elang Mulya Lesmana, Heri Hetanto, Hendriawan, dan Hafidin Royan, yang dikenal sebagai pejuang reformasi. Dalam perkembangan lebih lanjut, mahasiswa



berhasil menduduki Gedung DPR/MPR untuk menyampaikan tuntutan mereka. Melihat kondisi yang semakin memburuk, Presiden Soeharto akhirnya mundur dari jabatannya pada 21 Mei, menandai kemenangan bagi perjuangan mahasiswa.



Gambar 2. Ribuan mahasiswa menduduki Gedung MPR/DPR saat unjuk rasa menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, Mei 1998.

(Sumber: Indonesia, A. J. I. (2018). *Dokumentasi Peristiwa Reformasi.*)

Dari berbagai organisasi mahasiswa di Indonesia antara tahun 1966 hingga 1998, setiap kelompok memiliki tujuan dan metode yang berbeda, tergantung pada konteks zaman mereka. Jadi, perkembangan gerakan ini berubah-ubah. Contohnya, pada tahun 1966, fokus utama gerakan mahasiswa adalah Tritura (tiga tuntutan rakyat), dimana mereka menuntut penurunan harga dan penghapusan PKI. Pada waktu ini, mahasiswa tidak berjuang sendirian, mereka didukung oleh kelompok militer dan pelajar lain yang memiliki metode yang berbeda. Kemudian, antara tahun 1974 hingga 1979, gerakan mahasiswa lebih menitikberatkan pada kritik terhadap kepemimpinan nasional dan bantuan asing. Di tahun ini, mahasiswa harus berjuang secara independen melawan militer dan birokrat. Ada kemunduran gerakan yang terlihat



antara tahun 1980 dan 1990, di mana pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membekukan organisasi mahasiswa. Namun, pada tahun 1998, mahasiswa mulai aktif lagi dalam gerakan reformasi, yang akhirnya mengakibatkan jatuhnya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden. Sepanjang perjalanan sejarah gerakan mahasiswa di Indonesia, sudah terbukti bahwa mahasiswa memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini, yang terlihat melalui seminar, diskusi, dan aksi demonstrasi.

2. Proses Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto

a. Gerakan Mahasiswa 1998

Aktivis dalam gerakan mahasiswa dari lingkungan kampus mulai terlihat pada akhir Februari 1998. Hal yang mendorong organisasi mahasiswa dan civitas akademika yang sebelumnya tidak aktif untuk melawan pemerintah adalah kekhawatiran masyarakat karena lonjakan harga sembako dan ketakutan akan terputusnya studi serta masa depan yang tidak jelas pada mayoritas mahasiswa.

Aksi mahasiswa yang berlangsung sebelum dan setelah Sidang Umum MPR membawa sejumlah tuntutan. Pertama, mereka meminta agar harga barang-barang kebutuhan pokok menjadi lebih terjangkau, mengingat harga-harga ini terus meningkat sejak Juli 1997. Kedua, para mahasiswa juga menuntut agar MPR tidak mempertahankan Soeharto, yang sudah menjabat sebagai Presiden selama tujuh periode berturut-turut. Ketiga, mahasiswa menuntut adanya perubahan dalam bidang politik dan ekonomi setelah MPR memilih Soeharto sebagai Presiden dan BJ. Habibie sebagai wakil presiden.



Mahasiswa tidak hanya beraksi sendiri dalam meminta reformasi, tetapi juga menerima dukungan kuat dari bagian-bagian kelas menengah. Para rektor, dekan, dan dosen yang sebelumnya harus mengikuti aturan birokrasi kampus di banyak universitas kini mendukung suara reformasi yang diusulkan mahasiswa. Ketua Umum Muhammadiyah, Amien Rais, juga memberikan dukungan kepada gerakan mahasiswa yang menuntut dilakukannya reformasi.

Tindakan mahasiswa yang terjadi sepanjang bulan Februari 1998 mencapai puncaknya pada 12 Mei 1998 di Kampus Universitas Trisakti, Jalan Kyai Tapa, Grogol, Jakarta. Dalam insiden ini, empat mahasiswa Trisakti kehilangan nyawa akibat tembakan peluru tajam dari pihak kepolisian. Dari tanggal 13 hingga 15 Mei 1998, berlangsung aksi sebagai ungkapan duka dan kepedihan atas kematian mahasiswa Trisakti. Kerusuhan yang berlangsung pada tanggal 13 hingga 15 Mei 1998 mengakibatkan lebih dari seribu jiwa melayang di Jakarta. Banyak orang tewas saat berusaha untuk menjarah ratusan toko.



Gambar 3. Penjarahan pada kerusuhan 14 Mei 1998 di Jakarta.

(Sumber: Indonesia, A. J. I. (2018). *Dokumentasi Peristiwa Reformasi.*)



Keadaan di Tanah Air yang tidak stabil membuat Presiden Soeharto memperpendek kunjungannya di Kairo. Meskipun awalnya dijadwalkan pulang pada 16 Mei 1998, ia memutuskan untuk kembali pada 15 Mei 1998. Di kediamannya di Jalan Cendana, Presiden Soeharto mengadakan pertemuan dengan para ajudannya untuk meminta informasi terkini mengenai situasi di dalam negeri. Pemerintah memutuskan untuk menurunkan harga bahan bakar minyak pada hari berikutnya. Selain itu, Presiden berjanji akan melakukan reformasi di berbagai bidang dan segera mereshuffle Kabinet Pembangunan VII yang dipimpinya. Namun, langkah-langkah kebijakan ini tidak berhasil meredakan keadaan yang terjadi saat itu. Pada 18 Mei, mahasiswa mengambil tindakan untuk menduduki Gedung DPR/MPR (Nur Fitria and Hadi Wiranata 2025).

b. Mahasiswa Menduduki Gedung DPR/MPR

Peristiwa penembakan yang menimpa empat mahasiswa Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 diikuti oleh kerusuhan besar di Jakarta dari tanggal 13 hingga 15 Mei. Puncak kerusuhan terjadi pada 18 Mei 1998 ketika mahasiswa melakukan aksi duduk di Gedung DPR RI. Di luar gedung, demonstran memprotes dan menyampaikan permintaan mereka, sementara di dalam, pimpinan DPR beserta perwakilan mahasiswa dari Forum Komunikasi Senat Mahasiswa se Jabotabek (FKSMJ) mengadakan pertemuan untuk membahas kondisi negara (Soemardjan, 1999:175). Keputusan untuk berbicara tersebut diambil karena situasi di Indonesia semakin tidak terkendali dan mengancam persatuan bangsa. Tiba-tiba, masyarakat dikejutkan oleh pernyataan Harmoko, yang dikenal sebagai loyalis Soeharto, meminta Presiden untuk mundur demi persatuan dan kesatuan negara (Anderson,



1999:41). Pada pukul 15. 20 WIB, Harmoko, ketua DPR RI, bersama dengan para Wakil Ketua DPR, yaitu Ismail Hasan Metaareum (F-PP), Abdul Gafur (F-KP), Fatimah Achmad (F-PDI), dan Syarwan Hamid (F-ABRI), mengungkapkan bahwa presiden Soeharto sebaiknya mundur dari jabatannya.

Pada tanggal 19 Mei 1998, pukul 09. 00, di Gedung MPR/DPR, diadakan Rapat Pimpinan DPR bersama para pemimpin fraksi untuk membahas permintaan Ketua DPR Harmoko kepada Presiden Soeharto agar ia mengundurkan diri. Pertemuan yang berlangsung selama lima jam ini menghasilkan dukungan dari para pimpinan fraksi terhadap permintaan tersebut agar Soeharto mundur dengan cara yang terhormat dan sesuai dengan konstitusi (Luhulima, 2006:153).

Pada tanggal 20 Mei, Harmoko dan pimpinan MPR sekali lagi meminta agar Soeharto mundur. Namun, Soeharto menolak untuk melepaskan jabatannya. Akibatnya, Harmoko memberikan ultimatum, meminta Soeharto untuk mengundurkan diri pada hari Jumat (22/5) atau menghadapi sidang istimewa pada hari Senin (25/5). Akhirnya, Soeharto setuju untuk mengundurkan diri setelah mendapatkan jaminan akan perlindungan bagi keluarganya dan harta bendanya.





Gambar 4. Mahasiswa membawa 'keranda jenazah' Suharto saat menduduki Gedung MPR/ DPR menuntut Soeharto mundur sebagai Presiden RI, Jakarta, 21 Mei 1998.

(Sumber: Indonesia, A. J. I. (2018). Dokumentasi Peristiwa Reformasi.)

c. Soeharto Ditinggalkan Kroninya

Menjelang akhir masa jabatannya, Presiden Soeharto mulai kehilangan dukungan dari para pembantunya di jajaran pemerintahan. Pada tanggal 20 Mei, Harmoko bersama beberapa anggota Golkar yang sebelumnya setia kepadanya mengancam presiden untuk dimintai pertanggungjawaban melalui sidang Istimewa MPR. Dua mantan wakil presiden, Letjen Sudharmono dan Jenderal Try Soetrisno, juga memilih meninggalkan Soeharto. Ia tidak lagi bisa meyakinkan orang lain untuk bergabung dengan pemerintahannya atau dengan komite reformasi yang ia ajukan. Kerusakan pada basis kekuatannya menyebabkan militer enggan untuk memberikan dukungan kepada presiden (Anderson, 1999:68). Pada waktu itu, dukungan dari komunitas internasional untuk Soeharto juga telah hilang. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Madelaine Albright, mengeluarkan pernyataan melalui CNN menjelang tengah malam, menekankan perlunya Soeharto mundur demi transisi ke demokrasi (Notosusanto, 2009:673).



Tindakan menteri luar negeri ini diambil karena rasa penyesalan dan kekecewaan terhadap peristiwa Trisakti pada 12 Mei 1998. Menteri pertahanan pun mengimbau agar semua kerja sama militer AS dengan ABRI dihentikan tanpa batas waktu yang jelas (Zon, 2004:91).

Soeharto merasa semakin tertekan ketika para menterinya, yang dipimpin oleh Akbar Tanjung dan Ginandjar Kartasasmita, mengadakan pertemuan untuk menyusun pernyataan yang menyatakan ketidaksediaan mereka untuk menjadi bagian dari kabinet baru dan mendesak presiden untuk mengundurkan diri (Notosusanto, 2009:672).

Soeharto kemudian memerintahkan Mensesneg Saadillah Mursjid agar segera mempersiapkan proses pengunduran dirinya sebagai presiden sesuai dengan konstitusi. Dia juga instruksikan agar pengunduran dirinya dilaksanakan di Istana Merdeka. Kerumunan bersorak senang ketika mereka mendengar bahwa Soeharto setuju untuk mundur dari jabatannya. Pada hari Kamis, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya, yang diikuti oleh pelantikan dan pengambilan sumpah BJ. Habibie sebagai presiden Republik Indonesia di depan para pejabat negara. Setelah Soeharto selesai membacakan surat pengunduran dirinya, langsung diadakan upacara pengambilan sumpah BJ. Habibie sebagai presiden RI (Lilik et al. 2009).

3. Agenda Dan Tuntutan Reformasi

Reformasi 1998 merupakan momentum penting dalam sejarah politik Indonesia yang menandai berakhirnya rezim Orde Baru dan lahirnya tata pemerintahan baru yang lebih demokratis. Gerakan reformasi muncul sebagai respons terhadap akumulasi krisis multidimensional yang mencakup krisis



ekonomi, ketidakadilan politik, maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta melemahnya supremasi hukum. Kondisi tersebut melahirkan tuntutan masyarakat untuk merekonstruksi sistem politik agar lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, agenda reformasi tidak hanya bermakna sebagai perubahan figur kepemimpinan, melainkan sebagai transformasi struktural yang mencakup bidang politik, hukum, ekonomi, dan pemerintahan.

a. Tuntutan terhadap Suharto

Tuntutan terhadap Presiden Soeharto pada tahun 1998 merupakan puncak dari akumulasi kekecewaan masyarakat terhadap praktik kekuasaan Orde Baru yang berlangsung lebih dari tiga puluh tahun. Krisis multidimensional yang melanda Indonesia sejak 1997 meliputi krisis ekonomi, politik, dan sosial memperkuat dorongan masyarakat untuk menuntut perubahan struktural. Dalam konteks tersebut, gerakan mahasiswa, organisasi masyarakat sipil, dan berbagai lapisan masyarakat merumuskan sejumlah tuntutan utama yang ditujukan langsung kepada Soeharto sebagai simbol kekuasaan Orde Baru (Rustamana, Adillah, and Zatusia 2023).

b. Tuntutan Lengsernya Suharto

Masyarakat menuntut Soeharto untuk mengundurkan diri dari jabatan Presiden. Hal ini dilatarbelakangi oleh melemahnya legitimasi politik Soeharto akibat kegagalannya mengatasi krisis moneter dan meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap praktik otoritarian, korup, dan sentralistik. Pengunduran diri dianggap sebagai langkah paling efektif untuk membuka jalan bagi perubahan sistem pemerintahan yang lebih demokratis.



Sebuah kekecewaan Masyarakat tahun 1997 dalam (Urbaningrum, 1999:4) akibat adanya praktik KKN dalam birokrasi, lembaga-lembaga negara, serta perusahaan milik negara yang melibatkan kroni dan keluarga Soeharto telah memperburuk tingkat kesenjangan sosial di masyarakat. Ketimpangan tersebut muncul karena adanya perbedaan perlakuan pemerintah, di mana fasilitas dan dukungan yang diberikan kepada pengusaha dari kalangan masyarakat biasa tidak sebanding dengan kemudahan yang diterima oleh kroni dan keluarga penguasa. Situasi ini kemudian memicu meningkatnya rasa kecemburuan social (Lilik et al. 2009).

Akibatnya Mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh Indonesia turun ke jalan, menduduki gedung-gedung pemerintahan, dan menyuarakan tuntutan reformasi secara masif. Bersama masyarakat, mereka menuntut Presiden Soeharto untuk bertanggung jawab atas krisis multidimensi yang terjadi, termasuk melonjaknya harga kebutuhan pokok, pengangguran, serta menurunnya kualitas hidup rakyat. Aksi demonstrasi yang berlangsung secara terus-menerus, damai namun tegas, menunjukkan bahwa legitimasi kekuasaan Soeharto telah runtuh. Dalam tekanan politik dan desakan publik yang semakin kuat, gelombang protes tersebut akhirnya memaksa Soeharto mengundurkan diri (Lilik et al. 2009).

Kamis tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya yang kemudian dilanjutkan pelantikan dan pengambilan sumpah BJ. Habibie untuk jabatan Presiden RI di hadapan para pejabat negara. Setelah Soeharto usai membacakan surat pengunduran dirinya secara langsung dilakukan upacara sumpah pengangkatan BJ. Habibie sebagai presiden RI (Lilik et al. 2009).





Gambar 5. hari Kamis, 21 Mei 1998, Presiden Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya

(Sumber: <https://share.google/oP5vbIqpJQxzny14>)

c. Perubahan Amandemen UUD 1945

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, perhatian utama gerakan reformasi tertuju pada perlunya melakukan Amandemen UUD 1945. Amandemen ini dianggap sebagai langkah kunci untuk merombak struktur ketatanegaraan Indonesia yang selama Orde Baru terlalu sentralistik, memberi kekuasaan presiden yang sangat besar, dan minim mekanisme kontrol politik. UUD 1945 sebelum amandemen dinilai membuka ruang bagi praktik otoritarianisme, karena beberapa pasal bersifat umum, kurang rinci, serta memberikan interpretasi luas kepada pemerintah. Oleh karena itu, perubahan konstitusi menjadi mandat penting reformasi untuk menciptakan sistem politik yang demokratis, transparan, dan akuntabel (Suriadi, n.d.).



Amandemen UUD 1945 dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) secara bertahap dalam empat tahap, yaitu sebagai hasil Sidang Umum MPR 1999 (Amandemen I), hasil Sidang Umum MPR 2000 (Amandemen II), hasil Sidang Umum MPR 2001 (Amandemen III), hasil Sidang Umum MPR 2002 (Pelaksanaan et al. 2002).

Setiap tahap ditujukan untuk memperbaiki aspek berbeda dalam penyelenggaraan negara. Salah satu fokus utama adalah pembatasan kekuasaan presiden diantaranya:

1) Pembatasan kekuasaan presiden

Pembatasan kekuasaan presiden dianggap penting pada masa reformasi. Sebelum amandemen, presiden dapat dipilih kembali tanpa batas dan memiliki kewenangan luas terhadap lembaga negara lain. Setelah amandemen, masa jabatan presiden dibatasi menjadi dua periode, dan mekanisme pemilihan langsung diperkenalkan untuk memperkuat legitimasi demokratis.

Kekuasaan Presiden diatur dalam Bab III UUD 1945 tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, yang memuat 17 pasal dan mengatur berbagai aspek terkait kedudukan serta kewenangan Presiden dalam menjalankan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut konstitusi, sehingga setiap tindakan dan kewenangannya harus berlandaskan ketentuan dasar negara. Pasal 10 UUD 1945 menegaskan bahwa Presiden merupakan pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, yang berarti Presiden memiliki otoritas tertinggi terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI). Namun demikian, berbagai ketentuan dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, dan



Pasal 15 UUD 1945 memberikan batasan tertentu terhadap kekuasaan tersebut, sehingga mekanisme pemerintahan tetap berjalan sesuai prinsip konstitusional dan tidak bersifat absolut (Marpaung, Marpaung, and Roinda 2024).

2) Penghapusan Dwifungsi ABRI

Penghapusan Dwifungsi ABRI merupakan salah satu agenda fundamental pada Orde Baru. Konsep Dwifungsi ABRI merujuk pada peran ganda Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sekarang menjadi TNI dan Polri yang tidak hanya menjalankan fungsi pertahanan dan keamanan, tetapi juga terlibat aktif dalam bidang politik dan pemerintahan. Konsep ini dilembagakan pada masa Orde Baru dan digunakan untuk menjustifikasi keterlibatan militer dalam berbagai posisi strategis negara, termasuk parlemen, pemerintahan daerah, birokrasi sipil, dan perusahaan negara (Hasudungan 2021). Gerakan Reformasi menuntut penghapusan Dwifungsi ABRI dengan alasan bahwa militer harus kembali pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara, bukan sebagai kekuatan politik. (Yosarie and Kosandi 2023).

3) Supremasi Hukum

Pada masa Orde Baru, sistem hukum berjalan secara represif, sehingga prinsip supremasi hukum hanya dijadikan semboyan tanpa penerapan yang nyata. Hukum lebih sering dipergunakan sebagai sarana legitimasi kekuasaan yang dipenuhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selama lebih dari tiga dekade, kondisi tersebut terbukti tidak mampu mewujudkan kesejahteraan maupun keadilan bagi Masyarakat, yang memicu lahirnya reformas.

Supremasi hukum (rule of law) berarti bahwa seluruh tindakan pemerintah, lembaga negara, dan warga negara harus



tunduk pada hukum yang berlaku, bukan pada kehendak individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks Indonesia pasca-Orde Baru, penerapan supremasi hukum menjadi fondasi penting untuk membangun pemerintahan yang demokratis, transparan, dan bertanggung jawab (Alimukni 2024).

Penerapan supremasi hukum pasca-1998 diwujudkan melalui sejumlah langkah strategis.

- a) Pertama, dilakukan reformasi lembaga peradilan, termasuk peningkatan independensi Hakim, Mahkamah Agung, dan pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Selain itu, Komisi Yudisial (KY) dibentuk untuk menjaga integritas dan etika hakim agar penegakan hukum bebas dari intervensi politik maupun korupsi (Azikin 1998).
- b) Kedua, supremasi hukum diperkuat melalui pemberantasan korupsi yang menjadi persoalan mendasar dalam pemerintahan Orde Baru. Pemerintah pasca-reformasi membentuk sejumlah lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang berperan memerangi korupsi dan meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan negara. KPK secara khusus menjadi simbol komitmen negara untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu (Azikin 1998).
- c) Ketiga, penerapan supremasi hukum mencakup peningkatan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).



Reformasi menuntut negara untuk mengusut berbagai kasus pelanggaran HAM masa lalu serta menjamin perlindungan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) diperkuat dalam kewenangannya untuk menyelidiki kasus-kasus tersebut dan mendorong proses hukum yang adil (Azikin 1998).

d) Pelaksanaan Otonomi Daerah

Pada masa Orde Baru, sistem hukum berjalan secara represif, sehingga prinsip supremasi hukum hanya dijadikan semboyan tanpa penerapan yang nyata. Hukum lebih sering dipergunakan sebagai sarana legitimasi kekuasaan yang dipenuhi praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Selama lebih dari tiga dekade, kondisi tersebut terbukti tidak mampu mewujudkan kesejahteraan maupun keadilan bagi masyarakat. Situasi inilah yang kemudian memicu lahirnya gerakan reformasi pada tahun 1998, yang salah satu agenda utamanya adalah melakukan pembenahan secara menyeluruh dalam bidang hukum hari (Suriadi, n.d.).

Penerapan otonomi daerah secara resmi diwujudkan melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua regulasi ini memberikan kewenangan yang jauh lebih besar kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, layanan publik, hingga pengelolaan sumber daya alam tertentu. Undang-undang ini kemudian disempurnakan menjadi UU No.



32 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014 untuk menyesuaikan dinamika sistem pemerintahan (Azikin 1998).

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga kebutuhan warga dapat ditangani lebih cepat dan tepat. Kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan warga dan lebih memahami kondisi sosial, ekonomi, dan budaya wilayahnya. Ketiga, meningkatkan pemerataan pembangunan, terutama bagi wilayah yang selama Orde Baru tidak mendapatkan perhatian proporsional dari pemerintah pusat (Azikin 1998).

d. Awal reformasi dibawah BJ Habibie

Masa awal pemerintahan Bj Habibi dimulai dengan bergejolaknya keadan negara, dari berbagai sektor seperti ekonomi, politik, keadan sosial Masyarakat, dan dampak proses hebat dari aksi aksi mahasiswa. Maka dari itu pergantian pemerintahan Soeharto ke pemerintahan Bj Habibi mejadi harapan bagi Masyarakat untuk mendapat suatu perubahan.

Menurut Diana 2018: menjelaskan Presiden B.J. Habibie secara resmi menggantikan Soeharto pada Kamis, 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB, sesuai ketentuan TAP MPR No. VI Tahun 1973. Sehari setelah dilantik, yakni pada 22 Mei 1998, ia mengumumkan susunan kabinet barunya yang diberi nama Kabinet Reformasi Pembangunan. Kepemimpinan Habibie menandai berakhirnya Kabinet Pembangunan VII serta menjadi titik awal dimulainya era Reformasi di Indonesia (Wijaya & Permatasari, 2019). Masa pemerintahan Habibie berlangsung selama 512 hari relatif singkat namun mampu menghasilkan perubahan besar dalam stabilitas demokrasi,



proses reformasi, serta sistem politik dan ekonomi nasional. Dalam periode tersebut, Habibie berhasil meletakkan fondasi penting bagi demokratisasi, melakukan pengelolaan ekonomi yang lebih stabil, dan mendorong transformasi dalam sistem politik Indonesia (Marpaung, Marpaung, and Roinda 2024).



Gambar 6. Pelantikan dan pengambilan sumpah BJ. Habibie sebagai presiden Republik Indonesia di depan para pejabat negara

(Sumber: <https://share.google/g6IzIVDiyd7BQzESW>)

BJ Habibie membawa berbagai perubahan, transformasi ini terlihat dari bergesernya sistem politik yang sebelumnya bercorak otoriter pada masa Orde Baru menuju sistem politik yang lebih demokratis di bawah kepemimpinan Habibie. Beliau menrapkan sistem pemerintahan desentralistik, sehingga daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan pemerintahan (Marpaung, Marpaung, and Roinda 2024).

Sistem politik yang diterapkan Presiden B.J. Habibie melalui kepemimpinannya bersama Kabinet Reformasi Pembangunan membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk



menyampaikan pendapat. Di bawah pemerintahan Habibie, pola sistem politik yang sebelumnya bercorak otoriter pada era Orde Baru mengalami perubahan mendasar dan bergeser menuju sistem politik yang lebih demokratis, sehingga partisipasi publik dalam proses politik menjadi semakin terbuka (Marpaung, Marpaung, and Roinda 2024).

(Pureklolon, 2020. Menjelaskan Berbagai kebijakan strategis ditempuh pada masa kepemimpinan Presiden B.J. Habibie untuk mengubah sistem politik yang sebelumnya bercorak otoriter menjadi lebih demokratis. Di antara langkah penting tersebut ialah melaksanakan reformasi ekonomi, memulihkan legitimasi politik, mendorong amandemen UUD 1945, memperkuat penegakan HAM, membuka ruang kebebasan pers, hingga menyelenggarakan referendum di Timor Timur. Upaya Habibie dalam mendorong amandemen UUD 1945 menjadi fondasi utama bagi perubahan sistem politik Indonesia menuju model yang lebih desentralistis dan demokratis. Sistem politik demokratis ditandai oleh adanya pembagian kekuasaan serta pembatasan masa jabatan pemimpin negara. Hal ini berbeda dengan masa pemerintahan Soeharto yang tidak mengenal batasan masa jabatan dan menjadi ciri utama politik otoriter. Melalui amandemen UUD 1945, Habibie mendorong penataan ulang lembaga-lembaga negara serta menetapkan pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, masing-masing selama lima tahun. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga mekanisme kontrol pemerintahan dan mencegah kembalinya sistem politik yang bersifat otoriter (Marpaung, Marpaung, and Roinda 2024).

4. Dampak dan Warisan Reformasi

Reformasi membawa gelombang perubahan besar yang mengubah cara Indonesia berpolitik, mengatur daerah,



mengelola ekonomi, serta memperlakukan warganya dalam hal kebebasan dan hak dasar. Setelah puluhan tahun hidup dalam sistem yang mengontrol hampir semua aspek kehidupan, Reformasi menjadi titik balik yang membuka jalan bagi tatanan baru yang lebih terbuka dan demokratis.

a. Dampak Reformasi

1) Dampak Negatif

Agenda reformasi telah ditetapkan melalui berbagai ketetapan MPR dan berbagai produk perundang-undangan yang baru, tetapi setelah berlangsung lebih dari 10 tahun lamanya, terasa bahwa reformasi berjalan secara belum terarah.

Bila dinilai kembali kepada kondisi sebelum reformasi maka tampak bahwa kekuasaan yang pada waktu dulu bersifat orotiter, sekarang harus bersifat demoratis, pemerintahan yang terpusat harus menjadi desentralisasi. Pemerintahan yang bersifat tertutup dan penuh larangan serta pengawasan seharusnya lebih terbuka, transparan, serta kebebasan.

Rasionalitas dan objektivitas telah tersisihkan sehingga muncul egoism, perseorangan maupun kelompok tanpa mengidahan etika, moral, norma, dan hukum yang ada. Politik kekerasan banyak bermunculan dan berkembang mewarnai kehidupan baru dalam masyarakat sehingga sulit mengatasi maupun kehidupan bermasyarakat bangsa dan bernegara. Oleh karena itu, hal-hal seperti ini harus segera diatasi dan dihapuskan.

2) Dampak Positif

Dampak positif reformasi dapat kita rasakan dan kita saksikan melalui berita-berita media massa, serta surat kabar dan internet maupun pendapat-pendapat pengamat bidangnya.



Munculnya suasana baru yang bisa kita saksikan diantaranya terdapatnya kebebasan pers, kebebasan akademis, kebebasan berorganisasi dan lain-lain yang selama ini belum pernah ada, termasuk kebebasan pemikiran dalam memperjuangkan pembebasan tahanan politik maupun narapidana politik, hal ini bisa dinilai sebagai lambang dari suatu kebebasan berpolitik di Indonesia.

Timbulnya kesadaran baru masyarakat bisa bertindak dan berbuat sesuatu serta melakukan perubahan-perubahan diantaranya pendobrakan atas rasa ketakutan berpolitik, terhadap proses pembodohan yang telah berlangsung hampir lebih dari tiga puluh tahun.

Memang, sebelum gerakan reformasi dimulai maka semua orang merasakan kelemahan tidak bisa berbuat apa pun tanpa daya dan takut berpolitik, berpendapat, dan berbicara. Namun, dengan pengalaman baru bereformasi, masyarakat Indonesia, khususnya para mahasiswa, mulai sadar dan memiliki serta dapat memperjuangkan politik mereka yang benar-benar dapat membawa ke arah perubahan yang positif, kesadaran baru ini penting sekali artinya dalam rangka perjuangan selanjutnya menuju reformasi yang total dan menyeluruh.

b. Hasil Reformasi

Reformasi memang bukan hal yang mudah dalam pencapaiannya tetapi juga cukup banyak makan waktu. Berbagai macam paradox kita hadapi dan saksikan bersama. Banyak sorotan tajam dari masyarakat luas dewasa ini, yaitu penegakan hukum, pencegahan maupun penindakan terhadap KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) lama maupun yang muncul semasa reformasi karena hal tersebut menyangkut dan



berkaitan dengan ketertiban keamanan masyarakat, termasuk perlindungan terhadap para investor asing yang diharapkan ditangani secara serius oleh para pelaksana reformasi, khususnya para penguasa yang kompeten. Disamping itu, sangat didambakan lahirnya good governance yang mampu menangani segenap permasalahan krisis yang belum usai. Hal ini juga akan dibantu oleh seluruh public melalui organisasi kemasyarakatan dan organisasi non pemerintah yang pada dewasa ini belum banyak menyadari keberadaan ruang public yang diperuntukan bagi mereka dalam beraksi dan berkarya ikut membangun dan memperluas kemampuan good governance tersebut.

Untuk melihat hasil reformasi diharapkan munculnya seorang pemimpin yang mampu menangani permasalahan yang sedang dihadapi bersama secara nasional, juga sanggup memberikan kepemimpinan yang benar-benar efektif dan dapat diterima seluruh rakyat tentu melalui visi dan misi serta program-program yang betul-betul dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

c. Warsisan Reformasi

Jika Orde Baru dianalogikan sebagai rumah gelap yang menutup semua pintu dan jendela, Reformasi membuka semua akses itu sehingga cahaya bisa masuk. Masyarakat yang sebelumnya hanya diam dan menerima keadaan kini dapat menyampaikan pendapatnya.

Perubahan paling terlihat adalah kehidupan politik yang jauh lebih terbuka. Pemilu tidak lagi sekadar formalitas, tetapi menjadi momentum rakyat menentukan pemimpin. Media yang dulunya hanya menjadi corong pemerintah kini mampu



mengungkap kasus besar, mengkritik pejabat, bahkan mengawasi presiden.

Reformasi juga mengakhiri pemusatan kekuasaan pada satu orang. Dengan perubahan dalam UUD 1945, masa jabatan presiden dibatasi dan kekuasaan tidak lagi hanya berada di satu titik. Kekuasaan kini dibagi ke berbagai institusi, diawasi, dan tidak bisa dipakai sewenang-wenang.

Otonomi daerah menjadi warisan penting lainnya. Daerah yang sebelumnya hanya menjalankan perintah pusat kini bebas merancang pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing. Hasilnya beragam ada daerah yang sangat berkembang, ada pula yang tertinggal tetapi semuanya memiliki kesempatan untuk menentukan arah kemajuannya sendiri.

Dalam hubungan negara dan militer, Reformasi berhasil menarik militer dari panggung politik. Tentara kembali pada tugas pertahanan, sementara masyarakat sipil memegang peranan penting dalam pemerintahan. Langkah ini memperkuat demokrasi dan mengurangi dominasi militer dalam birokrasi.

Reformasi juga melahirkan lembaga-lembaga pengawas seperti Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, dan KPK yang berfungsi membatasi dan mengawasi kekuasaan. Kehadiran lembaga-lembaga ini membuat pemerintah tidak lagi bisa bertindak semena-mena seperti masa sebelumnya. Perubahan cara berpikir masyarakat menjadi salah satu warisan terbesar. Rakyat kini lebih kritis, lebih berani menuntut transparansi, dan tidak segan mengawasi pejabat publik. Diskusi, aksi protes, kritik melalui media sosial menjadi hal biasa dalam era demokrasi yang lebih matang. Amandemen UUD 1945 adalah jejak Reformasi yang paling monumental. Struktur



ketatanegaraan berubah, kekuasaan MPR yang dulu tertinggi dihapuskan, pemilihan presiden menjadi langsung, HAM ditegaskan kuat dalam konstitusi, dan sistem check and balance dipertegas. Meski membawa banyak kemajuan, Reformasi juga meninggalkan tantangan seperti polarisasi politik, penyalahgunaan kebebasan informasi, dan korupsi di daerah. Namun semua itu merupakan bagian dari proses menuju kedewasaan demokrasi dan Pada akhirnya, Reformasi menjadi fondasi bagi rumah baru bangsa Indonesia. Rumah itu mungkin belum sempurna, tetapi pondasinya jauh lebih kuat, lebih terbuka, dan memberi ruang bagi generasi masa depan untuk tumbuh dalam kebebasan yang dulu tidak pernah dinikmati generasi sebelumnya.

C. Rangkuman

Reformasi 1998 merupakan titik balik penting dalam sejarah Indonesia yang menandai berakhirnya kekuasaan otoriter Orde Baru dan lahirnya era demokratisasi. Peristiwa ini muncul akibat krisis multidimensi yang semakin parah, terutama saat krisis ekonomi Asia 1997–1998 mengguncang Indonesia. Melemahnya nilai rupiah, tingginya inflasi, dan meningkatnya pengangguran memperlihatkan rapuhnya fondasi ekonomi nasional yang penuh praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketidakmampuan pemerintah mengatasi situasi memicu turunnya kepercayaan rakyat terhadap rezim.

Sementara itu, pengekanan kebebasan politik, dominasi militer melalui Dwifungsi ABRI, serta berbagai pelanggaran HAM seperti Tragedi Trisakti dan penculikan aktivis memperkuat tuntutan perubahan. Mahasiswa bersama



masyarakat sipil muncul sebagai aktor utama yang mendorong gerakan reformasi melalui demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia.

Puncaknya, Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 setelah 32 tahun berkuasa. Meski pergantian pemimpin terjadi, reformasi tetap berlanjut melalui agenda struktural seperti amandemen UUD 1945, demokratisasi pemilu, penguatan supremasi hukum, dan pembatasan kekuasaan militer.



DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. W. (2010). Beberapa Catatan tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965.
- Aidit, D.N. (2014). Revolusi Indonesia. Jakarta: Yayasan Pembaruan.
- Anam, S. et al. (2024) 'Gagalnya gerakan 30 september 1965 dan dampak terhadap keberadaan partai komunis di indonesia', 3(September 1965), pp. 93–102.
- Arifin, F. (2024). Sustainability of National Development Program During Transition of Leadership In Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 8(1), 25–44. <https://doi.org/10.25072/jwy.v8i1.4319>
- Arimbi, D. A. (2011). The 1965 Indonesian Episodes in Public Memory. Repository Universitas Airlangga.
- Aryanto, D. (2023). Menelisik Potret Sejarah Pelaksanaan Pemilu Tahun 1977 : Detik-Detik Runtuhnya Tirani Kekuasaan Soeharto. 4(2), 108–116.
- Azikin, Andi. 1998. "Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi," 35–41.
- Baru, O., & Untarawati, D. (2024). Kronisme, Korupsi, dan Militerisme di Era Orde Baru. 1(2), 101–116.
- Booth, A. (1998). The Indonesian Economy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Macmillan Press.
- Budi Rajab. (2004). Negara Orde Baru: Berdiri di Atas Sistem

- Ekonomi dan Politik yang Rapuh (Budi Rajab). 182–202.
- Crouch, H. (2014). *The Army and Politics in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Dadan Adi Kurniawan. (2025). Kebijakan Kontroversial Pemerintah Orde Baru di Ranah Pendidikan Tinggi Indonesia dalam Perspektif Historis. 29–42.
- Datta, Ajoy, Harry Jones, Vita Febriany, and Dan Harris. n.d. *The Political Economy of Policy-Making in Indonesia for and Use of Knowledge*.
- Fada, I. S., Tanthowi, A., & Noviani, D. (2024). Pengaruh Globalisasi dan Modernisasi Hukum Waris di Indonesia. *Student Research Journal*, 2(3), 82-92.
- Fathonah, A. D., Sutiyah, S., & Yuniyanto, T. (2023). Peristiwa Malari dan Dampaknya terhadap Gerakan Mahasiswa Indonesia (1974-1998). *Candi: Jurnal Pendidikan ...*, 24(1), 1–11.
<https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/view/91141%0>
[Ahttps://jurnal.uns.ac.id/candi/article/download/91141/48210](https://jurnal.uns.ac.id/candi/article/download/91141/48210)
- Feith, H. (2007). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Jakarta: Equinox Publishing.
- Firdaus, D. W., & Megantara, T. (2022). HUBUNGAN BANK DUNIA DENGAN KEGAGALAN EKONOMI DI INDONESIA PADA MASA ORDE BARU. 9(2), 181–188.
- Gesmi, I., & Hendri, Y. (2018). *Pancasila Education Textbook*. Sidoarjo: Uwais Inspiration for Indonesia, 251(Acec), 414–417.
- Hadi, D. W. (2006). *PROPAGANDA ORDE BARU 1966-1980*.



40–50.

- Hadiz, V. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective*. Stanford University Press.
- Hardita, R. D. W., Prasetya, Y. B., & Fauzi, I. A. (2023). Gerakan Mahasiswa Pada Masa Orde Baru 1974-1978: Dari Malari sampai NKK/BKK. *Chronologia*, 4(3), 140–153. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jhe/article/download/11426/3633/33903>
- Hartono, Y. (2016). *Sejarah Kontroversial G30S/PKI*. Repository Universitas Terbuka.
- Hasan, N., Nusi, A., & Mopangga, H. (2020). Indonesia's New Order Era: Study of a democratic state with a "taste" of autocracy. *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 3(2), 85–95.
- Hasudungan, Anju Nofarof. 2021. "DWIFUNGSI ABRI DALAM POLITIK INDONESIA SEBAGAI MATERI PENGAYAAN KELAS XII SEJARAH INDONESIA" 3 (2).
- Hermansyah, U., & Sauki, R. (2025). Akhir Era Orde Baru Dan Awal Reformasi Di Indonesia. 1–10. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Hermansyah, Ujang, and Raihan Sauki. 2025. "Akhir Era Orde Baru Dan Awal Reformasi Di Indonesia," 1–10. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>.
- Hill, H. (2000). *The Indonesian Economy*. Cambridge University Press.
- Indonesia, A. J. I. (2018). *Dokumentasi Peristiwa Reformasi*.
- Inpantri, A. G., Ikbaarshaff, M., Siddiq, H., & Alhabsy, M. I.



- (2022). The Role and Development of the Function of ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) in the New Order Period. 1(2), 191–200.
- Iryana, Wahyu, and Muhamad Bisri Mustofa. 2023. “May 1998 Mass Riots in Jakarta : A Holistic and Contextual Analysis of Critical Political Communication” 33 (May 1998): 201–11.
- Jafar, M., & Aisyah, D. (2022). Muslim Jafar 1 , Devy Aisyah 2 , Amrina 3. 2338(2), 13–34.
- Januar, H. (2003). Peranan Multinational Corporations Dalam Industrialisasi Di Indonesia Pada Era Orde Baru. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5, 17–24.
- Jum'at, R. M., & Firdaus, D. W. (2022). Pemberedelan Pers Pasca Peristiwa Malapetaka 15 Januari (MALARI) 1974. *Bihari: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Ilmu Sejarah*, 5(1), 35–44.
<https://komunikasistisip.ejournal.web.id/index.php/komunikasistisip/article/view/194>
- Kashiwabara, K. (2016). Opini Publik dan Politik Luar Negeri: Sikap Masyarakat Indonesia terhadap ODA Jepang dalam Proyek PLTA Koto Panjang dan Hubungan Bilateral Indonesia-Jepang. *Indonesian Perspective*, 1(1), 43–62. <https://doi.org/10.14710/ip.v1i1.10478>
- Krisnadi, I. G. (2022). Historiografi Orde Baru yang hegemonik dan pembelajaran sejarah di sekolah. *Jurnal Historia*, 20(2), 145–160. Universitas Jember.
- Kusuma, T., & Afwan, B. (2021). Upaya Membangun Stabilitas Nasional Pada Kebijakan Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru (1967-1971). *Swarnadwipa*, 5(1), 17.



<https://doi.org/10.24127/sd.v5i1.2117>

- Laksana. (2025). ABRI Masuk Desa Kodam III Siliwangi : Program Pembangunan Desa Masa Orde Baru (1980-1998).
- Lilik, Penulis, Eka Aprilia, Penulis Drs, Kayan Swastika, M Drs Sumarjono, M Si, Program Studi, et al. 2009. "BERAKHIRNYA PEMERINTAHAN PRESIDEN SOEHARTO TAHUN 1998 Pembahasan" 1.
- Lubis, F. W. (2021). Dualisme Kepemimpinan Nasional 1966-1967: Sebuah Tinjauan Historis.
- Ma'arif, S. (2018). KEGAGALAN PRIVATISASI BUMN DI ERA REZIM ORDE BARU DALAM PERSPEKTIF EKONOMI POLITIK. 12, 59-66.
- Marpaung, Cindy Yohanna, Herman Parjuangan Marpaung, and Mey Roinda. 2024. "3 1,2,3" 10 (9): 95-102.
- Masitho, B. (2013). DINAMIKA POLITIK PEMBANGUNAN PADA MASA ORDE BARU (Studi Tentang Industrialisasi Ketergantungan dan Peran Modal Jepang). 118-123.
- Maulana, R., Septiyana, D., Fransiska, A., Ginting, B., & Angelica, S. (2023). Rahasia Terungkap : Menganalisis Dinamika Keamanan Pers Pada Masa Orde Baru (1966-1998). 2(2), 89-96.
- McVey, R. T. (2009). The Rise of Indonesian Communism. Singapore: NUS Press.
- Mirnawati, M., dkk. (2019). Film dan Propaganda Politik (Studi atas Film "G30S/PKI" dan "Jagal"). Jurnal Komunikasi.
- Mohsin, A. (n.d.). Politik Luar Negeri Republik Indonesia Masa Lampau, Kini dan Masa Depan : Suatu Tinjauan dan



Saran Kedepan. 7225–7244.

Muhammad, S. (2021). Studi Komparatif Kebijakan Luar Negeri Indonesia Bebas- Aktif dan Lebih Dekat ke Salah Satu Blok , Mana Yang Lebih Menguntungkan Kepentingan Nasional Indonesia ? 5(September 1948), 8141–8146.

Nasution, Z. (2014). Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan. 1(2), 1–10.

Nitisastro, W. (2010). Pengalaman Pembangunan Indonesia. Kompas.

Noricha, N. A. P. (2025). G30S/PKI: Menanamkan Nilai Pancasila dalam Pembelajaran Sejarah.

Nur Fitria, Maine, and Irawan Hadi Wiranata. 2025. “Kasus Trisakti 1998: Pelanggaran HAM Dalam Dinamika Reformasi Indonesia.” Prosiding Konseling Kearifan Nusantara (KKN), 116–25. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/kkn/article/view/6474>.

Paryanto. (2025). MILITERISME DALAM POLITIK INDONESIA: SEJARAH RESTROSPEKTIF ORDE BARU DAN TANTANGAN DEMOKRASI Paryanto Paryanto. 9, 26–37.

Pelaksanaan, Sejarah, D A N Amandemen, Amandemen Iv, Amandemen Iv, Sidang Umum Mpr, Sidang Umum Mpr, Amandemen Ii, et al. 2002. “BAB XIII AMANDEMEN UNDANG UNDANG DASAR 1945” 1945.

Permata, H. (2016). Gerakan 30 September 1965 dalam perspektif filsafat sejarah Marxisme. Jurnal Filsafat, 25(2), 220–251.



- Permata, H. (2018). Gerakan 30 September 1965 dalam Perspektif Politik dan Militer Indonesia.
- Purnomo, H. (2020). Peralihan Kekuasaan di Indonesia Tahun 1966-1967: Tinjauan Yuridis terhadap Supersemar dan Tap MPRS No. XXXIII/1967.
- Purwanta, H. (2020). The New Order policy toward history curriculum for the school (a case of Indonesia). *JSSH: Journal of Social Science and Humanities*, 8(1), 35-44.
- Rajab, B. (2002). Otoritarianisme-birokratik orde baru, krisis ekonomi dan politik, dan demokrasi formal masa reformasi. 8(1), 59-78.
<https://doi.org/10.20473/jpi.v8i1.21817>
- Reza Hariyadi, A. (2021). Dinamika Kebijakan Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 259-276.
<https://doi.org/10.30656/jdkp.v2i2.3887>
- Ricklefs, M. C. (2012). *A History of Modern Indonesia since c.1200* (4th ed.). London: Palgrave Macmillan.
- Robertson-snape, Fiona. 2019. "Corruption , Collusion and Nepotism in Indonesia," no. August 2010.
<https://doi.org/10.1080/01436599913703>.
- Roosa, J. (2015). *Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia*. Madison: University of Wisconsin Press.
- Rustamana, H Agus, Putry Maharani Adillah, and Zamin Zatu. 2023. "1998 Reform Movement" 2 (6): 543-62.
- Sahasad, H., & Ridwan, M. (2020). *The Malari 1974, Press and the Soeharto's New Order: A Historical Reflection on*



- Student Movement in the Authoritarian Era. Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences, 3(4), 2796–2806. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1289>
- Saka, S., Karya, M., & Brata, S. (2025). Efek Panoptikon Orde Baru dalam Cerkak Berjudul Seksi Saka Menara Karya Suparto Brata. 3(1), 64–75.
- Sardiman, S., dkk. (2021). Militarization of history education: A study on New Order era history textbook. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 10(1), 12–25.
- Sari, I., & Huda, K. (2019). Dampak Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 terhadap Kehidupan Politik dan Sosial di Indonesia.
- Setiyanto, A., Hariyono, H., & Widiadi, A. N. (2022). Gerakan Mahasiswa Angkatan 1966 dalam Perspektif Sejarah Politik Indonesia.
- Setyowati, A. (2023). Perkembangan Karakter Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(4), 779–784. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i4.4812>
- Shodiq, A., & Maula, F. L. (2025). Paradigma Perekonomian Indonesia pada masa orde lama, orde baru, dan reformasi. 1, 698–713.
- Siregar, E. S. (2021). Dampak Reformasi Pendidikan Indonesia Di Abad 21. *JGK (Jurnal Guru Kita)*, 5(4), 123-136.
- Siro, Ikhsan, and Hamdan Tri Atmaja. 2020. "Journal of Indonesian History" 9 (2): 100–107.
- Sulistiowati, R. (2013). Teori pembangunan dunia ketiga dan



- pengaruhnya terhadap pembangunan nasional. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 5(9), 1–13.
- Suparjan, E. (2016). Peristiwa G 30 S sebagai isu kontroversial pada mata pelajaran sejarah di SMA Kota Bima. *Jurnal Pendidikan Sejarah*, 5(1), 38–48.
- Suriadi, Hari. n.d. “Sejarah Perkembangan Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Di Indonesia” 2 (2): 193–210.
- Suryani, P. (2017). Peran Program Inpres dalam Pemerataan Pembangunan. Garuda.
- Suwirta, A. (2018). Pers dan Kritik Sosial pada Masa Orde Baru : Peristiwa MALARI Tahun 1974 dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka dan Indonesia Raya di Jakarta. *Susurgalur Jurnal Kajian Sejarah & Pendidikan Sejarah*, 6(1), 73–98.
- Umasih. (2019). History learning in Indonesia during the New Order. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 3(1), 22–33.
- Umi, F. (2023). Anak muda dan ketidaksadaran sejarah reformasi. FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Widodo, H. (2017). Industrialisasi Berorientasi Ekspor pada Akhir Orde Baru. *Journal of Indonesian Economic Studies*.
- Wuriyanti, A., & Nasution. (2013). PENYEHATAN MONETER INDONESIA AWAL ORDE BARU (MERGER BANK SWASTA NASIONAL INDONESIA TAHUN 1971-1977) Allung Wuriyanti Jurusan Pendidikan Sejarah , Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Surabaya Nasution Jurusan Pendidikan Sejarah , Fakultas Ilmu Sosia. 1(3), 428–439.



- Yosarie, IkhsanYosarie, and Meidi Kosandi. 2023. "Analisis Penempatan Prajurit TNI Di Jabatan Sipil Pada Masa Orde Baru Dan Pascareformasi." *Indonesian Journal of Religion and Society* 5 (2): 82-94. <https://doi.org/10.36256/ijrs.v5i2.352>.
- Yosima Halawa, Subaryana, A. K. (2022). *TJANTRIK : Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah* TJANTRIK : Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah. 1(1), 11-21.
- Zanynu, M.A. (2018) 'Gerakan 30 September : Narasi " Dewan Jenderal " Di Situs Berita Utama Indonesia Tahun 2017', 9(April), pp. 1-18.



DINAMIKA ORDE BARU

*Dari Konsolidasi Pembangunan
Menuju Krisis
Hingga Reformasi*

Buku *Dinamika Orde Baru* mengajak pembaca menelusuri perjalanan panjang pemerintahan Orde Baru sebagai salah satu fase paling menentukan dalam sejarah Indonesia modern. Dimulai dari upaya konsolidasi kekuasaan pasca-1965, buku ini menguraikan bagaimana stabilitas politik dijadikan fondasi utama bagi pembangunan nasional yang terencana dan terpusat.

Pembahasan kemudian diarahkan pada strategi pembangunan ekonomi melalui berbagai program Repelita yang berhasil mendorong pertumbuhan, modernisasi infrastruktur, serta peningkatan peran negara dalam pengelolaan sumber daya. Namun di balik capaian tersebut, buku ini juga mengungkap sisi lain Orde Baru: menguatnya sentralisasi kekuasaan, pembatasan kebebasan politik, serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin mengakar.

Puncaknya, krisis multidimensional akhir 1990-an menjadi titik balik yang mengguncang legitimasi rezim. Krisis ekonomi, tekanan sosial, dan gelombang gerakan mahasiswa serta masyarakat sipil membuka jalan bagi runtuhnya Orde Baru dan lahirnya era Reformasi. Buku ini menempatkan peristiwa tersebut bukan sebagai kejadian yang tiba-tiba, melainkan sebagai akumulasi dari dinamika politik, ekonomi, dan sosial yang berlangsung selama lebih dari tiga dekade.

Melalui analisis yang runtut dan reflektif, buku ini tidak hanya merekam fakta sejarah, tetapi juga mengajak pembaca memahami pelajaran penting dari masa lalu Orde Baru sebagai bekal untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih demokratis di masa depan.



Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
Pondok Karisma Residence
Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

